



**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 36 Tahun 2012**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH GAS RUMAH KACA (RAD – GRK)
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa posisi geografis Provinsi Jambi yang sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan *Bali Action Plan* pada *the Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC)* dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP ke-16 di Cancun serta memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*Bussines as Usual/BAU*), maka Pemerintah telah menyusun langkah-langkah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca;
- c. bahwa untuk mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3557)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN – GRK), tanggal 20 September 2011;
 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009, Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DI PROVINSI JAMBI

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Provinsi Jambi
6. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.
7. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
8. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
9. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area

tertentu dalam jangka waktu tertentu.

10. Tingkat emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan.
11. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
12. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.
13. Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK.
14. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.

Pasal 2

- (1) RAD-GRK yang disusun memuat kegiatan inti dan kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan dalam RAD-GRK mencakup bidang:
 - a. pertanian dalam arti luas;
 - b. kehutanan dan lahan gambut;
 - c. energi dan transportasi;
 - d. industri ;
 - e. pengolahan limbah;
 - f. kegiatan pendukung lainnya.
- (3) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RAD-GRK ini merupakan pedoman bagi:

- (1) SKPD/institusi teknis di Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman umum dan petunjuk pelaksana penurunan GRK di masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 4

RAD-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan institusi teknis di daerah, melaksanakan RAD-GRK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

- (2) Pelaksanaan dan pemantauan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bappeda.
- (3) Pelaksanaan RAD-GRK pada masing-masing SKPD/institusi teknis di daerah, diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD/pimpinan institusi teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Untuk menurunkan emisi GRK di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK.
- (2) Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK berpedoman pada RAD-GRK Provinsi Jambi dan RAN-GRK, serta prioritas pembangunan daerah.
- (3) Penyelesaian Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 7

Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan RAD-GRK dan Petunjuk Pelaksanaan RAD-GRK Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jambi dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 8

- (1) RAD-GRK dapat direview dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperhatikan perkembangan dinamika Nasional dan Internasional.
- (2) Review dan evaluasi terhadap RAD-GRK dilakukan oleh SKPD/institusi teknis terkait di daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Hasil review dan evaluasi terhadap RAD-GRK dilaporkan oleh Kepala BLHD Provinsi Jambi kepada Bappeda Provinsi Jambi dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- (4) Hasil review dan evaluasi terhadap RAD-GRK merupakan dasar dalam melakukan revisi terhadap RAD-GRK.

Pasal 9

- (1) SKPD/Institusi teknis daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dengan tembusan Bappeda Provinsi Jambi dan BLHD Provinsi Jambi secara berkala, paling

sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi melaporkan pelaksanaan RAD-GRK kepada Gubernur Jambi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Pendanaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya pengundangan peraturan Gubernur ini dengan dalam berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : **Jambi**
pada tanggal : 10 Agustus 2012

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 10 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

SYAHRASADDIN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 36

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah jenis gas yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan secara alami, yang jika terakumulasi di atmosfer akan mengakibatkan suhu bumi semakin panas. Panas yang diakibatkan oleh GRK tadi dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim global, yang berdampak meningkatnya suhu permukaan air laut, sehingga es di kutub utara maupun kutub selatan mencair. Jika tidak ada upaya untuk meminimalisir dampak negatifnya maka luas permukaan bumi akan berkurang. Dampak lain dari pemanasan global berupa terjadinya perubahan iklim, yang secara langsung maupun tidak langsung, sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman pangan, yang menjadi sumber makanan pokok manusia, seperti padi, gandum, kacang dan lain-lain. Kondisi tersebut dapat mengancam stabilitas ketahanan pangan dunia.

Untuk mengurangi laju kecepatan perubahan iklim global dapat dilakukan dengan mengurangi sumber emisi GRK, terutama yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan mengurangi faktor penyebab pelepasan GRK yang tersimpan secara alami di permukaan bumi, seperti halnya Clorat hidrat yang tersimpan di pegunungan es dalam jumlah besar, yang dapat terlepas ke atmosfer jika lapisan esnya mencair.

Langkah untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim, tidak dapat dilakukan oleh sebagian penduduk di suatu negara atau daerah, melainkan harus dilakukan oleh seluruh penduduk di belahan bumi manapun. Oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian dunia terhadap perubahan iklim ini, maka pada pertemuan Komisi Tingkat Tinggi pemimpin negara/pemerintahan ke 20 di Copenhagen Denmark, telah disepakati untuk mengurangi emisi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pada pertemuan tersebut Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 % dengan kemampuan sendiri dan 41 % dengan bantuan pihak luar.

Untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut Pemerintah Indonesia telah menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan Presiden tersebut menjadi pedoman bagi daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). RAN-GRK maupun RAD-GRK merupakan komitmen yang nyata secara nasional maupun daerah melalui 5 sektor yang berpotensi sebagai sumber emisi yakni : kehutanan, pertanian, industri, energi dan pengelolaan limbah.

Penyusunan RAD GRK mengutamakan pelaksanaan pembangunan ekonomi dengan target utama penurunan emisi Karbon disetiap sektor tanpa mengubah program/kebijakan pembangunan yang ada. Paradigma yang digunakan dalam pembangunan rendah karbon adalah pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan lintas sektoral dan lintas pemerintahan serta mengutamakan kebijakan dan kegiatan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Provinsi Jambi dengan bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah dan lahan gambut. Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi memiliki potensi sebagai penyimpan Karbon (Stok Karbon) maupun sebagai penghasil Karbon (Emitter Karbon). Aktivitas perekonomian masyarakat Provinsi Jambi juga menjadi peluang sebagai sumber emisi Karbon. Dominasi sektor perkebunan dan pertanian dapat mempengaruhi alih fungsi lahan hutan, perubahan tata guna lahan menjadi penyebab utama emisi karbon di daerah yang memiliki kawasan hutan. Aktivitas pemukiman, sektor industri menghasilkan limbah cair, padat, maupun gas. Semua limbah tersebut berpotensi sebagai penghasil emisi Karbon. Penghitungan semua aktivitas perekonomian pada setiap sektor yang menghasilkan emisi Karbon akan menentukan perhitungan mitigasi yang akan dilakukan. Kegiatan mitigasi ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jambi.

1.2. TUJUAN

Penyusunan RAD-GRK diperlukan guna memberi panduan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon sehingga konsistensi pelaksanaannya menjadi terukur dan terarah serta mampu mendukung konsistensi pembangunan rendah karbon secara nasional.

1.3. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari penyusunan RAD-GRK Provinsi Jambi adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pedoman perencanaan daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RAD-GRK adalah :

1. Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework Convention on Climate Change.
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Presiden Nomor. 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor. 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
7. Peraturan Presiden Nomor. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca

8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 01 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2010-2015.
9. Peraturan Gubernur Jambi No 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD RGK) Provinsi Jambi.

1.5. KERANGKA WAKTU PENYUSUNAN

Jangka waktu penyusunan RAD-GRK adalah selama satu tahun, dimulai dari Januari hingga Desember 2012. Jadwal pelaksanaan penyusunan RAD-GRK terdapat pada jadwal palang berikut :

Tabel 1. Jadwal Palang Penyusunan RAD-GRK Provinsi Jambi :

No	Kegiatan	Bulan					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1.	Tahap Persiapan						
	Pembentukan Tim						
	Sidang Pleno 1 : Arahan & Persiapan						
	Kajian Awal						
	Persiapan Teknis						
	Sosialisasi 1. Persiapan RAD GRK						
2.	Tahap Pengumpulan Data						
	Data dan Informasi Umum						
	Data dan Informasi Teknis						
	Identifikasi Kelembagaan Publik						
	Identifikasi Kelembagaan Masyarakat						
3.	Tahap Analisis						
	Analisis Emisi BAU Baseline						
	Analisis Usulan Mitigasi						
	Analisis Peran Kelembagaan Daerah						
4.	Tahap Perumusan Rencana Aksi						
	Sidang Pleno 2 : Konsolidasi hasil Pokja						
	Seleksi dan penentuan prioritas						

	Penentuan Target Reduksi Emisi						
	Formulasi Strategi Implementasi						
5.	Tahap Penetapan						
	Draft Naskah Peraturan Gub						
	Penetapan Peraturan Gub						
	Deseminasi RAD GRK						

II. PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK

2.1. PROFIL PROVINSI JAMBI

Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara $0^{\circ}74'$ - $2^{\circ} 46,16'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 12'$ - $104^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km² yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km² dan luas lautan 4.445,94 Km².

Batas-batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Jambi terbagi atas 9 kabupaten , 2 kota, 131 kecamatan, 1.124 desa dan 150 kelurahan. Secara rinci luas dan jumlah administrasi Pemerintahan Jambi Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Provinsi Jambi Tahun 2010

No	Kab/Kota	Luas			Ibu Kota	Jumlah Kecamatan
		Darat	Laut	Total		
1	Kerinci	3.334,99		3.334,99	Siulak	12
2	Merangin	7.508,23		7.508,23	Bangko	24
3	Sarolangun	5.948,73		5.948,73	Sarolangun	10
4	Bungo	4.673,16		4.673,16	Muaro Bungo	17
5	Tebo	6.205,81		6.205,81	Muaro Tebo	12
6	Batanghari	5.536,86		5.536,86	Muaro Bulian	8
7	Muaro Jambi	5.321,67		5.321,67	Sengeti	11
8	Tanjung Jabung Barat	4.990,95	384,21	5.375,16	Kuala Tungkal	13
9	Tanjung Jabung Timur	4.943,36	4.061,73	9.005,09	Mura Sabak	11
10	Kota Sungai Penuh	353,76		353,76	Sungai Penuh	5
11	Kota Jambi	172,26		172,26	Jambi	8
	JUMLAH	48.989,78	4.445,94	53.435,72		131

Sumber : Biro Pemerintahan & Otda Setda Prov.Jambi, 2010

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat. Morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 2.2. Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi / Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0-100)	3.282.315	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi Merangin, Batang Hari
Dataran sedang (100-500)	832.826,26	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, Sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, Sebagian Tanjung Jabung Barat
Dataran Tinggi (>500)	783.836,48	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, Sebagian Sarolangun, dan sebagian Bungo
Jumlah Luas Daratan	4.898.978	100	

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a) Pertanian Lahan Basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,96 % dari total luas daratan Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3% dan ketinggian 0-10 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Batanghari dan sub WS nya.
- b) Pertanian Lahan Kering Dataran Rendah (LKDR) sampai sedang luasnya 2.474.105 hektar atau 56,08% dari luas total daratan Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10 - 100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo bagian tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin, bagian selatan dan Kerinci bagian Tengah).
- c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKTD) luasnya 903.180 hektar atau 18,44% dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 11,53% merupakan dataran tinggi dengan ketinggian diatas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi.

Adapun menurut karakter kompleks ekologisnya, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Tabel 2.3. Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi

Uraian	Karakter Lahan Pertanian		
	LB	LKDR	LKDT
Proporsi Luas Lahan	18,41 %	53,87 %	18,71 %
Kemiringan	0-3 %	3-12 %	12-40 %

Topografi	0-10 m dpl	10-100 m dpl	100-500 m dpl
Penggunaan Lahan Eksisting	Hutan rawa Hutan bakau, nipah Semak belukar Sawah tanda hujan Sawah pasang surut Sawah irigasi Kebun Kelapa Permukiman Hutan lindung	Hutan primer Ladang berpindah Karet rakyat Hultikultura Sawah irigasi Kelapa sawit Permukiman Hutan lindung	Hutan primer Ladang berpindah Perkebunan kayu Manis Hultikultura Sawah irigasi Semak belukar Permukiman Hutan lindung
Upaya Pemanfaatan Lahan	Input teknologi menengah tinggi	Ketersediaan unsure Hara	Keterbatasan lahan karena hutan lindung
Komoditi Potensial	Sawah pasang surut Sawah tandah hujan Sawah irigasi Palawija, Hultikultura Kebun kelapa, kopi kakao Perikanan laut & tambak	Sawah irigasi Palawija Hortikultura Pternakan Perkebunan sawit Karet, kopi , kakao Perikanan kolam dan tambak	Kayu manis (Casiavera) Sawah irigasi Holtikultura Kopi Perikanan kolam
Cukupan wilayah	Tanjung Jabung Barat dan Timur WS Batang Hari	Tanjab Timur Kota Jambi Batanghari Bungo, Tebi tengah & selatan Sarolangun	Kerinci kecuali bagian tengah Bungo, Tebo barat dan Utara Sarolangun Utara dan barat

Keterangan :

LB : Lahan Basah

LKDR : Lahan Kering Dataran Rendah

LKDT : Lahan Kering Dataran Tinggi

Sumber : Hasil Analisis Tim KLHS RTRW Jambi, 2010

Selain areal hutan , penggunaan lahan Provinsi Jambi masih didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi sebesar 26,20%, di ikuti oleh perkebunan sawit sebanyak 19,22%.

Sisanya berturut-turut terlihat pada tabel 2.4 di bawah.

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Tahun 2009

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lahan Permukiman	49,631	1.01%
2	Sawah Tadah Hujan	126,662	2.58%
3	Tegalan/Ladang	117,516	2.40%
4	Kebun Campuran	112,787	2.30%
5	Kebun Karet	1,284,003	26.20%
6	Kebun Sawit	941,565	19.22%
7	Kebun Kulit Manis	93,609	1.91%
8	Kebun The	4,691	0.10%
9	Semak dan alang-alang	87,177	1.78%
10	Hutan Lebat	1,433,470	29.25%
11	Hutan Belukar	413,406	8.44%
12	Hutan Sejenis	187,704	3.83%
13	Lain-lain	47,757	0.97%
Jumlah		4,899,978	100.00%

Sumber : Hasil Analisis, 2010

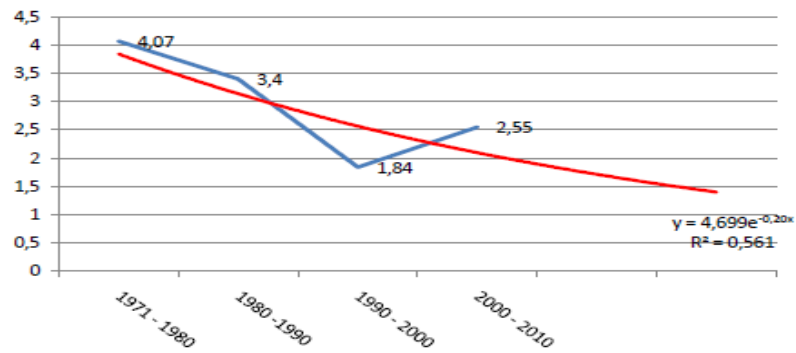
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 sebanyak 3.092.265 jiwa, meningkat 28,11% dibandingkan satu dasawarsa sebelumnya yang berjumlah 2.413.846 jiwa, dan telah berubah sebesar 207,36% sejak Sensus Penduduk pertama kali diadakan pada tahun 1971, seperti tertera pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 . Perubahan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971 - 2010

Tahun	Penduduk	% Perubahan
1971	1,006,084	-
1980	1,445,994	43.73%
1990	2,020,568	39.74%
2000	2,413,846	19.46%
2010	3,092,265	28.11%

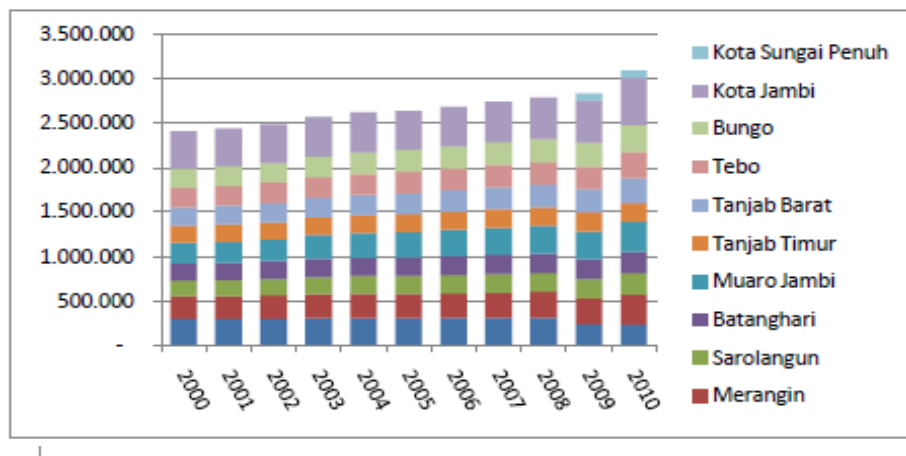
Sumber: BPS Provinsi Jambi tahun 2010

Sedangkan laju pertumbuhan tiap dasawarsa menunjukkan kondisi fluktuatif dengan tren cenderung menurun seperti pada tabel 2.6, dan pada tahun 2030 diperkirakan laju pertumbuhan di Provinsi Jambi tidak akan melebihi angka 1,5% per tahun sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1.



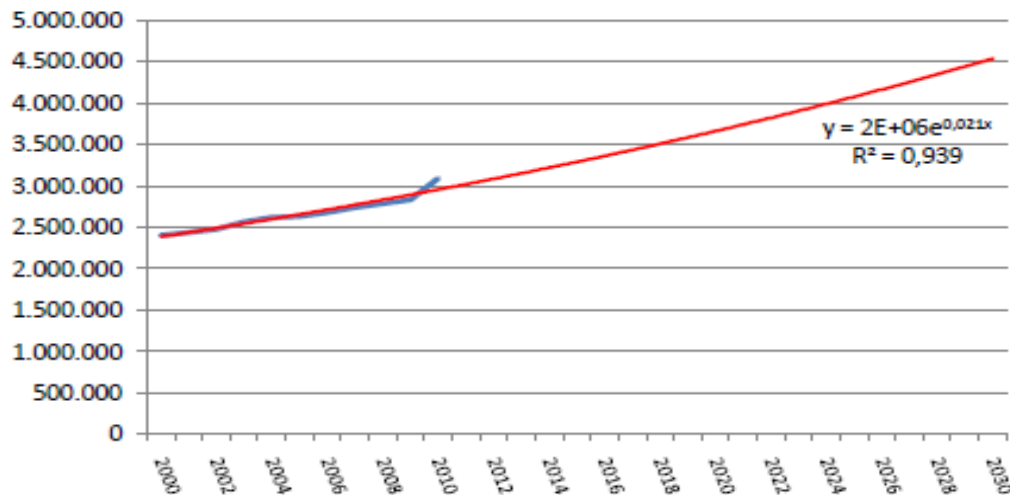
Grafik 2.1.
Trend dan Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 1971-2010
(Sumber BPS Provinsi Jambi. Diolah)

Dilihat data perubahan penduduk dalam Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam satu dasawarsa, hingga tahun 2010 Kota Jambi memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi yakni 531.857 jiwa 17,20%, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sungai Penuh dengan jumlah 82.293 jiwa atau 2,66%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik 2.2.



Grafik 2.2. Perubahan Penduduk Provinsi Jambi dirinci per Kabupaten/Kota Tahun 2000 – 2010. (Sumber BPS. Diolah)

Berdasarkan hasil analisis tren, diperkirakan jumlah penduduk di Provinsi Jambi pada tahun 2030 mencapai lebih dari 4,5 juta jiwa. Angka proyeksi penduduk dari tahun 2000 hingga tahun 2030 dapat dilihat pada grafik 2.3.



Grafik 2.3. Tren dan Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2030
(Sumber : BPS Provinsi Jambi diolah)

Kepadatan penduduk merupakan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Berdasarkan luas daratan Provinsi Jambi rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah 63 jiwa/km². Pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar 99 jiwa/km². Perkembangan kepadatan penduduk antar satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya tidak merata dan perubahannya signifikan.

Kecenderungan kepadatan penduduk yang besar terdapat di daerah perkotaan. Kota Jambi yang sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Jambi merupakan daerah terpadat penduduknya yaitu 3.570 jiwa/km², sedangkan daerah yang relatif jarang penduduknya adalah Kabupaten Merangin yaitu 53 jiwa/km².

Rincian dan penyebaran kepadatan penduduk pada setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada table 2.6.

Tabel 2.6. Luas Wilayah dan Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2030

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (KM ²)	Jumlah Kec	Kepadatan			
				2010		2030*	
1	Kerinci	3,334.99	12	229,495	69	370,000	111
2	Merangin	7,508.23	24	333,206	44	400,000	53
3	Sarolangun	5,948.73	10	246,245	41	365,000	61
4	Bungo	4,673.16	17	303,135	65	455,000	97
5	Tebo	6,205.81	12	297,735	48	375,000	60
6	Batanghari	5,536.86	8	241,334	44	345,000	62
7	Muaro Jambi	5,321.67	11	342,952	64	705,000	132
8	Tanjung Jabung Barat	4,990.95	13	278,741	56	460,000	92
9	Tanjung Jabung Timur	4,943.36	11	205,272	42	285,000	58
10	Kota Sungai Penuh	353.76	5	82,293	233	125,000	353
11	Kota Jambi	172.26	8	531,857	3,088	615,000	3,570
Jumlah		48,989.78	131	3,092,265	63	4,500,000	99
*Proyeksi							
Sumber: BPS Provinsi Jambi 2000-2010. Diolah.							

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAMBI

Tim analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 Provinsi Jambi mengemukakan bahwa permasalahan pembangunan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

2.2.1. Transportasi

Sebagian jalan di Provinsi Jambi merupakan jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan kota dan kabupaten di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2011, ruas jalan yang berstatus jalan nasional dan jalan provinsi adalah sepanjang 2.416.99 km. Panjang jalan yang berstatus jalan nasional sepanjang 936,48 km, dimana prosentase jalan dalam kondisi baik sebesar 42,14 %, sedang 45,20%, rusak ringan 8.40%, rusak berat 4,27%. Adapun jalan yang berstatus jalan Provinsi adalah sepanjang 1.480,51 km, dimana yang berada dalam kondisi baik adalah sebesar 34,56 %, sedang 36,86%, rusak ringan 19,76 %, rusak berat 8,82 %.

2.2.2. Energi

Cakupan layanan listrik di Provinsi Jambi pada Tahun 2006 telah mencapai 80,40%. Kondisi ini meningkat menjadi 84,39% pada Tahun 2009. Sedangkan untuk persentase pengguna listrik serta Ratio Elektrifikasi Provinsi Jambi juga secara bertahap setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2011 mencapai 53.44%. Konsumsi energi di Provinsi Jambi s.d. Agustus Tahun 2010 adalah sebesar 491,23 GWh dengan rata-rata konsumsi per bulan sebesar 61,90 GWh diprediksi konsumsi pada Tahun 2010 mencapai 740 GWh. Dengan demikian beban puncak sistem pada bulan Mei adalah sebesar 107 MW.

Tabel 2.7. Potensi Energi di Provinsi Jambi

No	Potensi	Jumlah
1	GI Aur Duri, Kapasitas GI Aur Kapasitas	2 x 30 MVA
2	GI Payo Selincah, kapasitas	2 x 30 MVA
3	GI Muara Bulian, Kapasitas	2 x 30 MVA
4	GI Aur Duri, Kapasitas	2 x 30 MVA
5	GI Payo Selincah, kapasitas	2 x 30 MVA
6	GI Payo Selincah, kapasitas	2 x 60 MVA
7	GI Muara Bulian, Kapasitas	2 x 30 MVA

Sumber : ESDM, 2010

Kemampuan daya pembangkit yang ada di Sistem Jambi sebesar 76,7 MW, dengan demikian maka terdapat defisit daya sebesar 30,3 MW . Masih rendahnya tingkat elektrifikasi dan defisit daya di Provinsi Jambi memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pada tahun 2015 tingkat elektrifikasi mencapai 82%. Sumberdaya yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi target ini antara lain adalah PLTU dengan bahan baku Batu Bara seperti di Kabupaten Sarolangun dan Bungo

Selain itu, juga telah tersedia Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang tersebar yang sudah beroperasi di Merangin dan Bungo yang secara keseluruhan berjumlah 8 unit dengan kapasitas mencapai 390 KV, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sarolangun. Sedangkan kedepan, Provinsi Jambi memiliki potensi PLTMH yang belum dikembangkan dengan kapasitas sebesar 4.461,6 KW berada di 21 titik lokasi.

Tabel 2.8. Lokasi dan Kapasitas Energi

No	Kabupaten	Lokasi		Kapasitas	Keterangan
				(KVA)	
1	MERANGIN	1	Desa Dusun Tuo, Kec. Lembah Masurai	60	Beroperasi
		2	Desa Baru, Kec. Jangkat	20	Beroperasi
		3	Desa Gedang, Kec. Jangkat	50	Beroperasi
		4	Desa Talang Tembago, Kec. Jangkat	50	Beroperasi
		5	Desa Rantau Suli, Kec. Jangkat	50	Beroperasi
		6	Desa Koto Rami Kec. Lembah Masurai	60	Beroperasi
2	BUNGO	7	Desa Renah Sungai Besar, Kec. Lembur Lubuk Mingkuang,	50	Beroperasi
		8	Desa Renah Sungai Ipuh, Kec. Lembur Lubuk Mingkuang,	50	Beroperasi
TOTAL				390	

2. 2. 3. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan masyarakat dapat dilihat dari beberapa data antara lain adalah : tingkat kemiskinan di daerah pedesaan karena sebagian besar dari penduduk di wilayah pedesaan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Data dua tahun terakhir menunjukkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan justru mengalami peningkatan dari 6,67% meningkat menjadi 7,53%, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan total tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dari 8,34 pada tahun 2010 menjadi 8,65%.

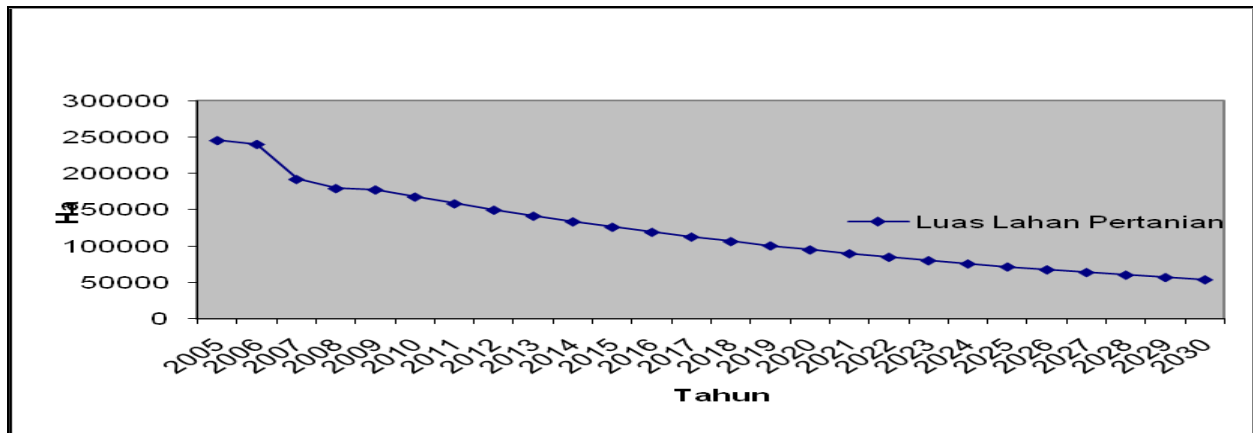
Tabel 2.9. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi (2010-2011)

Uraian	Maret 2010	Maret 2011
Data Kemiskinan		
1. Urban	11,80	11,19
2. Rural	6,67	7,53
3. Urban + Rural	8,34	8,65
Garis Kemiskinan		
1. Urban	262.826	294.522
2. Rural	193.834	219.144
3. Urban + Rural	216.187	242.272

Sumber : BPS Jambi, 2011

2.2.4. Ketersediaan Pangan

Dari sebelas kabupaten/kota wilayah kabupaten di Provinsi Jambi masih terkategori defisit rendah ketersediaan bahan pangan, sementara sisanya telah menunjukkan surplus bervariasi dari surplus rendah satu kabupaten, mengalami sedang 4 (empat) kabupaten serta surplus tinggi 2 (dua) kabupaten. Dua kabupaten yang tergolong surplus tinggi adalah Kabupaten Kerinci dan Tanjung Jabung Timur yang merupakan dua kabupaten yang menjadi lumbung pangan Provinsi Jambi. Seperti yang tergambar pada Grafik 2.4. berikut :



Grafik 2.4. Tren penurunan luas lahan pertanian

Oleh sebab itu dalam upaya menjaga laju produksi dan produktifitas bahan pangan perlu disikapi dengan baik dengan kebijakan yang mengarah pada:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan
2. Mengembangkan infrastruktur pertanian pedesaan.

2.3. Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi

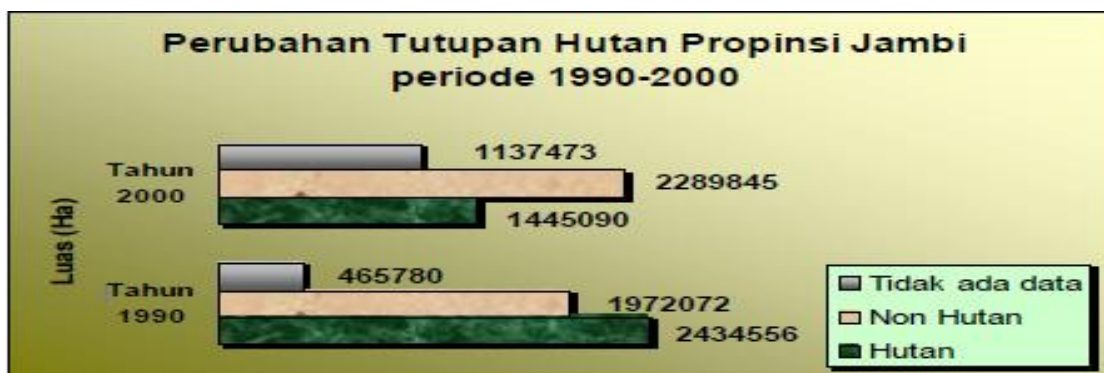
2.4. PERMASALAHAN EMISI GRK

Tingkat emisi Karbon Provinsi Jambi yang terukur sebesar 57 MtCO₂ pada tahun 2005 dan akan terus meningkat menjadi 74 MtCO₂ pada tahun 2039 (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2010). Lahan gambut dan penggunaan lahan serta perubahan penggunaan lahan menjadi kontributor utama bagi emisi di Provinsi Jambi. Emisi dari sektor ini merupakan 85 % dari emisi keseluruhan di Provinsi Jambi. Penyebab utama emisi disektor ini jika dikaitkan dengan hasil analisis Tim Analisis KLHS RTRW 2011- 2031 adalah :

2.3.1. Kerusakan Lahan dan Alih Fungsi Lahan

Secara keseluruhan pada tahun 1990 masih terdapat 2.4 juta Ha hutan atau sekitar 49.97% dari seluruh luas Provinsi Jambi. Hutan seluas itu terdiri dari berbagai tipe baik hutan dataran rendah, hutan sub alpin (pegunungan) ataupun hutan rawa. Sisanya adalah tutupan lahan non-hutan seperti perkebunan, pertanian, lahan kering tidak produktif, lahan basah tidak produktif, pemukiman dan lahan terbuka serta tidak ada data (awan, bayangan awan dan tubuh air).

Untuk Provinsi Jambi, dengan menggunakan metode analisa yang sama untuk Tahun 1990, diketahui tutupan lahan hutan Provinsi Jambi Tahun 2000. Terlihat nyata perubahan tutupan lahan hutan pada periode sepuluh tahun dari jangka waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 dimana tutupan lahan hutan hanya tinggal sebesar 1,4 juta hektar atau sekitar 29,66 % dari seluruh luas Provinsi Jambi.



Sumber: Hasil Pengolahan citra landsat TM oleh Lab.GIS KKI WARSI Tahun 2004

Grafik 2.5.

Grafik perubahan tutupan lahan Jambi dari Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2000

Telah terjadi pengurangan luas tutupan lahan hutan hampir 1 juta hektar, tepatnya sebesar 989.466 hektar atau sekitar 20,31 % tutupan lahan hutan di Jambi hilang dalam jangka waktu sepuluh tahun. Tahun 2000 tutupan lahan hutan dataran rendah dan pegunungan mengalami pengurangan sebesar 435.610 hektar atau 8,94 % dari tutupan hutan tahun 1990. Sedangkan untuk hutan rawa mengalami pengurangan tutupan hutan sampai tahun yang sama adalah sebesar 553.856 hektar atau 11,37 % dari tutupan hutan yang dibandingkan.

Tabel 2.10. Perubahan tutupan Provinsi Jambi dari Tahun 1990 Sampai dengan tahun 2000

Penutupan	Tahun 1990		Tahun 2000		Besarnya Perubahan	
	Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
Lahan Hutan	2434556	49.97%	1445090	29.66%	-989466	-20.31%
Non Hutan	1972072	40.47%	2289845	47.00%	317773	6.52%
Tidak Ada Data	465780	9.56	1137473	23.35%	671693	13.79%
TOTAL	4872408	100.00%	4872408	100.00%	0	0.00%

Sumber: Hasil Pengolahan citra Landsat TM oleh Lab.GIS KKI WARSI tahun 2004

Catatan : Yang termasuk kedalam kelas bukan hutan adalah perkebunan, pertanian, pemukiman, lahan kering tidak produktif, lahan basah tidak produktif, dan perairan, sedangkan yang termasuk kedalam kelas tidak ada data adalah awan dan bayangan awan.

Laju kehilangan tutupan hutan Jambi sebesar 989.466 hektar atau sekitar 20,31 % dalam jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipicu oleh berbagai faktor, baik karena adanya campur tangan manusia maupun karena fenomena dan bencana alam. Faktor yang berasal dari adanya campur tangan manusia seperti konversi lahan hutan menjadi penggunaan lain terutama untuk perkebunan besar dan lahan budidaya lainnya, aktifitas HPH, HTI, dan pertambangan yang tidak sepenuhnya dikelola sesuai dengan aturan yang telah ada. Disamping itu penambahan jumlah penduduk baik secara alami maupun karena program transmigrasi telah memperberat tekanan terhadap hutan, terutama kebakaran dan pembakaran hutan antara tahun 1997 – 1998, yang telah menghanguskan ribuan hektar hutan di Provinsi Jambi.

1. Konversi hutan tersisa untuk perkebunan kelapa sawit

pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap menjadi trend yang dipilih oleh sebagian besar kabupaten di Provinsi Jambi. Dari sisi produksi, kelapa sawit telah menggeser komoditi utama yang selama ini menjadi andalan dan bahkan telah identik dengan daerah Jambi, yaitu karet. Sebelum Tahun 1998, produksi karet selalu menjadi nomor satu diantara komoditi perkebunan lainnya. Tetapi sejak Tahun 1998 kondisi telah berubah dimana produksi kelapa sawit telah mencapai 237.658 ton, sementara karet hanya 232.345 ton. Pada Tahun 2000,

produksi kelapa sawit telah jauh melambung menjadi 540.240 ton meninggalkan karet yang hanya berproduksi 238.884 ton.

Pertambahan luas dengan percepatan seperti itu jelas menyumbang besar terhadap laju deforestasi di Provinsi Jambi. Kendati laju penanaman dan pembangunan perkebunan yang baru bergerak melambat sejak krisis ekonomi Tahun 1997, tetapi semangat berbagai daerah untuk menggaet investor agar masuk ke sektor ini masih tinggi.

2. HTI/HPHTI

Di Jambi, menurut data Dinas Kehutanan Propinsi Jambi (2001), terdapat sebanyak 10 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang masih aktif sampai dengan Desember 2001 dengan jumlah total pencadangan areal seluas 349.408 Ha. Sementara perusahaan HTI pulp yang masih aktif hanya satu yaitu PT. Wira Karya Sakti dengan izin luas areal 350.000 hektar hingga tahun 2010.

3. Illegal logging

Kondisi lain yang juga berperan memacu peningkatan aktifitas illegal logging adalah kesenjangan antara kemampuan produksi legal dan permintaan. Taman Nasional lainnya yang berada di Provinsi Jambi yaitu Taman Nasional Berbak (TNB), Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT) dan Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD) juga terus menjadi sasaran illegal logging dan berbagai tekanan lainnya. Taman Nasional Berbak misalnya, masih dengan motif yang sama aktifitas illegal logging dipicu oleh munculnya *sawmill* liar disekitar TNB dan *sawmill* lain diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan pada awalnya merupakan sesuatu yang alami pada hutan-hutan Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan iklim yang dimiliki sebagai negara tropis. Hutan-hutan tropis basah yang belum terganggu umumnya cukup tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar jika periode kemarau memang berkepanjangan.

5. Transmigrasi

Pada rentang waktu 1990-2000, menurut data BPS (2000) terjadi penambahan luas tanaman karet baru unggul seluas 23.637 ha. Tetapi secara keseluruhan, penambahan luas

perkebunan karet lebih besar lagi. Jika pada tahun 1990 luas perkebunan karet masih 470.896 hektar, maka pada tahun 2000 meningkat menjadi 558.570 hektar yang berarti terjadi penambahan luas \pm 87.674 hektar.

Sampai saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan hutan alam tersisa belum menunjukkan arah yang menggembirakan. Jika menggunakan angka laju kehilangan hutan rata-rata sebesar 989.466 hektar untuk periode sepuluh tahunan terhitung mulai tahun 2001 maka pada tahun 2010 hutan alam yang tersisa di Jambi hanyalah seluas 455.624 hektar saja. Prediksi ini sangat mengerikan karena angka tersebut jauh lebih kecil bahkan dari jumlah luasan Taman Nasional yang dimiliki Jambi menurut paduserasi TGHK dan RTRWP saat ini, yaitu 608.630 hektar. Artinya jika kondisi seperti sekarang terus terjadi, Provinsi Jambi nyaris tidak memiliki hutan alam lagi selain Taman Nasional pada sepuluh tahun mendatang. Tidak ada lagi hutan lindung, hutan suaka alam, apalagi hutan produksi.

6. Konflik Lahan

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir seluruh sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Untuk Indonesia termasuk Provinsi Jambi kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan (*Land Based Agriculture Activities*). Sehingga hampir perhatian seluruh sektor bertumpu pada lahan.

Selain itu, konflik lahan juga dipicu dengan adanya kebijakan pemanfaatan lahan, yaitu pemberian HGU yang belum memasukan pertimbangan lingkungan. Hal ini ditandai dengan konflik lahan terbesar antara PT. Wira Karya Sakti dan Masyarakat Desa Senyerang Kecamatan Pengabuan pada Tahun 2010, yang diikuti konflik lahan yang terjadi antara PT. Asiatic Persada dan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) pada Tahun 2010.

7. Biodiversitas

Di Provinsi Jambi terdapat 4 Taman Nasional; Taman Nasional Kerinci Seblat (1.389.509,87 Ha), Bukit Tiga Puluh (144.223 Ha), Bukit Dua Belas (60.500 Ha) dan Berbak (162.700 Ha). Berbagai jenis satwa dan flora langka banyak terdapat di dalam Taman Nasional tersebut. Namun demikian saat ini jenis tersebut semakin terancam punah akibat terus diburu oleh orang-orang yang mencari keuntungan.

Sebagai contoh fauna dan flora yang terdapat di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), adalah: TNKS merupakan habitat terakhir dari Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*) yang populasinya sangat kecil. Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) adalah satwa yang paling menarik perhatian masyarakat.

Jenis satwa kelas primata diwakili oleh Siamang (*Symphalangus sundactylus*). Jenis Ungko (*Hylobates agilis*) merupakan "raja" pepohonan karena kepandaianya melakukan atraksi (pergerakan di pohon). Jenis satwa kera ekor panjang (*macaca nemestrina*) dapat dijumpai di dekat pemukiman penduduk. Jenis Primata yang cantik yaitu Simpei (*Presbytis melapophos*) umum dijumpai dipohon yang sedang berbuah.

Keseluruhan jenis satwa kelas mamalia di TNKS mencapai 36 jenis, kurang lebih 24 jenis diantaranya adalah satwa langka yang dilindungi. Sedangkan jenis burung tercatat 140 jenis burung (*Avifauna*) dengan jenis penting diantaranya burung air diwakili oleh Kuntul/Bangau (*Egretta intermedia*), bangsa burung pemangsa siang diwakili oleh Elang (*Halistur indus*), dan Ulung ulung (*Spilornis cheela*), Burung pemangsa malam diwakili oleh Burung Hantu (*Otus scops*) dan lainnya. Jenis satwa kelas reptilia antara lain biawak (*Varanus salvator*), dan beberapa jenis ular, misalnya ular sanca (*Phyton reticulatus*).

Tabel 2.11. Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Jambi

Kawasan Lindung	Luas Kawasan
TN Kerinci Seblat	1.389.509,87 Ha
TN Bukit Tiga Puluh	144.223 Ha
TN Bukit Dua Belas	60.500 Ha
TN Berbak	162.700 Ha
CA Hutan Bakau Pantai Timur	6500 Ha
CA Hutan Bulian Luncuk	7480 Ha
Tahura Sultan Thaha Syaifuddin	60500 Ha
TWA Bukit Sari	300 Ha
Tahura Senami	15830 Ha
Hutan Lindung Gambut	15965 Ha

8. Menurunnya Kearifan Lokal

Pola kearifan lokal yang dikembangkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan diantaranya :

1) Agroforestry

1. Talang, yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jambi dengan tanaman utama karet, kebun buah-buahan seperti durian, duku dan beberapa tanaman buah lainnya.
2. Hompongan, yang dilakukan oleh Orang Rimba dengan tanaman utama karet, kebun buah-buahan dan beberapa tanaman lainnya.

2) Hutan Alam

1. Hutan Adat, dengan pemanfaatan kayu untuk internal desa dan bukan bersifat komersial
2. Hutan Lindung Dusun, Hutan Hulu Air, yang berfungsi sebagai fungsi lindung, biasanya untuk sumber air dan keselamatan
3. Rimbo/Imbo Pusako, Rimbo/Imbo Prabukalo, Puasa, yang semuanya berfungsi lindung dalam konsep yang lebih luas.

3) Sungai dan Rawa

1. Lubuk Larangan
2. Lebak dan Lebung Larangan

Dari gambaran di atas timbul kekawatiran, akan lenyapnya kerifan lokal masyarakat, hal tersebut sudah saatnya untuk dipertahankan, oleh sebab itu muncul beberapa pertanyaan;

1. Semua hutan adat berada dalam Hutan Produksi (HP), dan sampai dengan hari ini secara nasional Hutan Adat belum ada landasan hukumnya. Ancaman utamanya adalah konversi lahan, dimana Pemerintah Pusat memberikan izin kawasan hutan yang didalamnya ada Hutan Adat menjadi Hutan Tamana Industri (HTI) atau peruntukan lainnya
2. Semakin tingginya laju migrasi penduduk dari luar Provinsi Jambi yang 'lapar lahan' dan pada akhirnya migran merambah sampai pada kawasan Hutan Adat dan kawasan lindung lainnya.

Ada beberapa contoh inisiatif kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh Bupati akan tetapi belum mendapatkan pengakuan. Untuk itu didalam Tata Ruang, lokasi Hutan Adat yang sudah mendapatkan SK perlu diakomodir didalam RTRW. Beberapa Keputusan Bupati yang sudah diterbitkan terkait dengan pengukuhan Hutan Adat yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut :

- Keputusan Bupati Merangin Nomor 95 Tahun 2002 Tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat.

- Surat Keputusan Bupati Nomor. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung seluas 690 Ha sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin
- Surat Keputusan Bupati Nomor. 36 Tahun 2006 tentang Pengukuhan Hutan Adat Imbo Pusako dan Imbo Prabukalo Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin
- Surat Keputusan (SK) Bupati Bungo Nomor. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo seluas 2.455 Hektar
- Perda Kabupaten Bungo Nomor. 03 Tahun 2006 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Datuk Senaro Putih yang terdiri atas Desa Batu Kerbau dan Baru Pelepat

Penurunan kearifan lokal saat ini terjadi pada dataran rendah Provinsi Jambi dan kawasan gambut di wilayah hilir Provinsi Jambi. Jadi secara umum, penurunan kearifan lokal terjadi mulai dari tengah, hingga kearah Timur Provinsi Jambi. Sementara di daerah hulu, kearifan masih dipertahankan dengan upaya untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutannya. Oleh karena itu perlu segera diakui pengelolaan hutan lestari yang berbasis masyarakat. Dan selanjutnya perlu dikuatkan dengan adanya dukungan dan keseriusan pemerintah untuk mengakomodir kearifan masyarakat didalam RTRW.

2.5. TELAHAH DAMPAK PROGRAM STRATEGIS TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

A. Dampak Program Terhadap Isu Strategis Alih Fungsi Lahan

Tabel. 2.12. Dampak Program terhadap Isu Strategis Alih Fungsi Lahan

Program	Dampak		
	Primer	Sekunder	Tersier
Perkebunan	Konflik lahan	Rawan social	Pertikaian Ketidakpercayaan Keamanan dan Kenyamanan Terganggu
	Lahan pangan berkurang	Stock pangan Berkurang	Rawan pangan
	Areal hutan berkurang	Erosi meningkat	Ketersediaan air bersih berkurang

Pertambangan	Kerusakan lahan ex pertambangan	Biodiversity Berkurang Lahan pertanian Berkurang	Flora dan fauna alami musnah
	Pencemaran	Kualitas air di tempat tertentu Menurun	Ketersediaan air bersih berkurang
Pengembangan Kawasan Hutan	Hutan tanaman dan hutan tanaman industri	Keragaman hayati dan fauna Berkurang	Erosi meningkat
Program Jalur Penghubung Pusat Ekonomi (MP3EI)	Membendung aliran air, Memutus koridor satwa, memutus akses pemukiman masyarakat dan perkebunan rakyat	Menimbulkan genangan, satwa stress, penurunan Akses	Banjir, satwa mati, akses masyarakat terputus, perdagangan dan jasa masyarakat di sepanjang koridor jalan lama akan colapase
Perujudan sistem prasarana transportasi (Jalan Nasional Sengeti – Tanjabbar	Koridor satwa terganggu	Satwa stress	Satwa punah, konflik satwa dan manusia

B. Telaah dampak program terhadap Visi Jambi dalam Peta Jalan Ekosistem Sumatera

WWF Indonesia memberi dukungan kajian analisis ruang untuk melihat dampak dari kebijakan, rencana dan program yang terkait di Provinsi Jambi dan juga dalam raperda RTRW Provinsi Jambi terhadap Peta jalan Ekosistem Sumatera. Kajian yang dilakukan adalah melakukan superimposed antara Integrasi Vision Sumatra & Rimba terhadap :

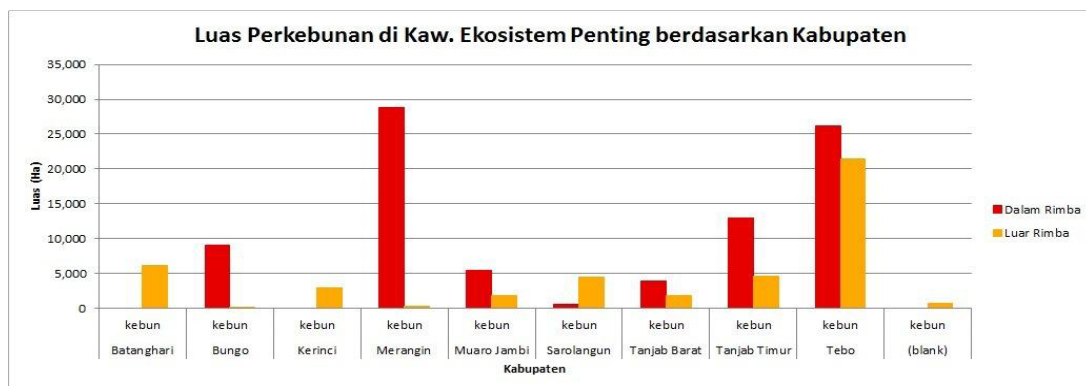
1. Ijin HTI
2. Ijin Perkebunan
3. Ijin Tambang
4. Draft Pola Ruang v.2009 & v. 2011
5. Struktur Ruang (Rencana pembangunan jalan trans Sumatera)

Konsesi HTI di bagian utara Jambi (PT. WKS) sebagian berlokasi di dalam area Rimba sehingga *best management practic* sangat penting untuk dipastikan implementasinya, terlebih apabila area konsesi tersebut juga masuk ke dalam kategori area ekosistem penting menurut Vision Sumatra. Berdasarkan perhitungan dengan aplikasi GIS, di Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur terdapat area konsesi HTI yang berlokasi di kawasan Ekosistem penting sekaligus di dalam area Rimba, dengan masing-masing luas 11.374 Ha, 30.740 Ha, dan 10.770 Ha.

Tabel 2.12. Lokasi Hutan Tanaman Industri dalam Jaringan Ekosistem Jambi

Vision	Kabupaten	Lokasi HTI (Ha)		
		Dalam Rimba	Luar Rimba	Total
Jaringan Ekosistem	Batanghari		11,956.69	11,956.69
	Merangin	5,429.18		5,429.18
	Muaro Jambi	11,322.28	6,662.80	17,985.08
	Sarolangun		9,855.54	9,855.54
	Tanjab Barat	34,801.65	63,389.58	98,191.23
	Tanjab Timur	31,916.66	8,465.57	40,382.23
	Tebo	1,182.66	8,308.26	9,490.92
	(blank)		88.97	88.97
Kawasan Ekosistem	Batanghari		5,847.47	5,847.47
	Merangin	11,347.10		11,347.10
	Muaro Jambi	146.72		146.72
	Sarolangun		22,108.65	22,108.65
	Tanjab Barat	30,740.92	14,898.11	45,639.03
	Tanjab Timur	10,770.85	930.39	11,701.24
	Tebo	273.59	974.23	1,247.82
	(blank)		27.66	27.66
Kawasan Pembangunan	Batanghari		10,882.81	10,882.81
	Merangin		409.89	409.89
	Muaro Jambi	602.1	4,433.10	5,035.20
	Sarolangun		2,326.55	2,326.55
	Tanjab Barat	47.57	72.10	119.67
	Tanjab Timur	122.26		122.26
	Tebo		6,738.43	6,738.43
	Sarolangun		669.04	669.04
No Data	Tanjab Barat		410.70	410.70
	(blank)		36.83	36.83
Total		138,730.55	179,493.39	318,223.94

Vision Sumatra dan batas kawasan Rimba di *overlay* dengan data pekebunan dari peta diatas, kemudian diklasifikan sebarannya berdasarkan lokasi terhadap kelas vision sumatra dan posisinya terhadap kawasan Rimba apakah di dalam atau di luar dari kawasan Rimba. Analisa sebaran perkebunan terhadap kawasan ekosistem penting berdasarkan Vision Sumatra dan Rimba. Area ekosistem penting berdasarkan Vision merupakan area yang penting secara biodiversity, terutama karena di area tersebut masih terdapat tutupan hutan alam yang keberadaannya semakin terancam. Berdasarkan *overlay* data perkebunan terhadap kawasan ini, didapat tabel dan grafik sebagai berikut:



Grafik 2.6.
Grafik Luas Perkebunan di Kawasan Ekosistem Penting

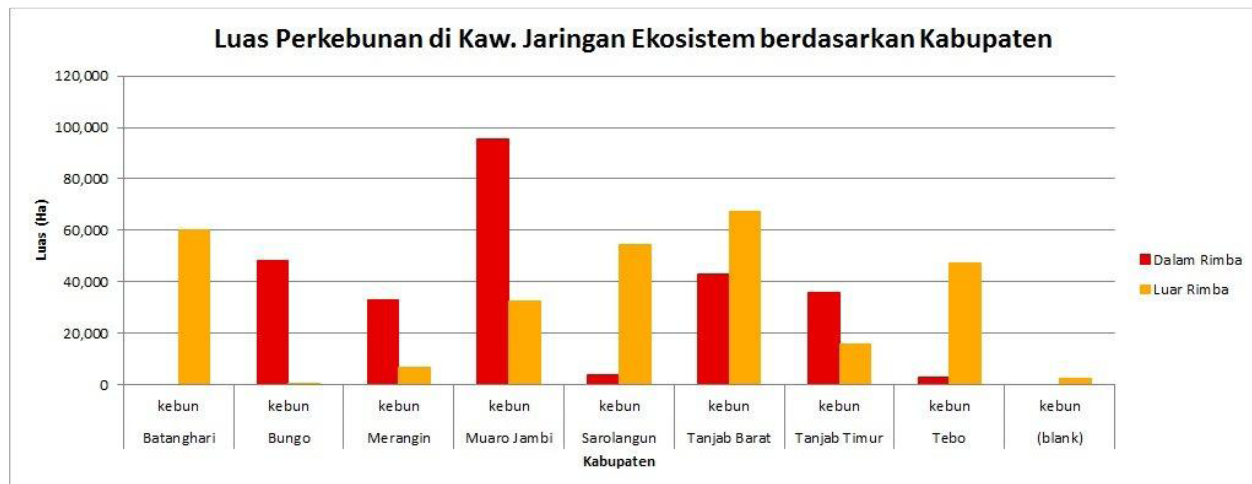
Dari hasil analisa, bisa dilihat bahwa Kabupaten Merangin memiliki perkebunan yang berlokasi di dalam Rimba dengan luas sekitar 28.000 Ha dan juga Tanjung Jabung Timur dan Tebo yang masing-masing memiliki perkebunan dalam area Rimba dengan luas 12.900 dan 26.100 Ha. Terutama untuk kabupaten Tebo yang memiliki area perkebunan yang luas di dalam Rimba, tapi juga di luar Rimba yang masih merupakan kawasan ekosistem penting berdasarkan Vision Sumatra (luas 21.000 Ha, sehingga total +/- 47.500 Ha), pada area perkebunan ini sangat penting untuk mengimplementasikan BMP (Best Management Practic) agar terhindar dari upaya ekspansi lahan di sekitarnya terutama ekspansi terhadap areal yang berhutan alam.

Analisa sebaran perkebunan terhadap kawasan jaringan ekosistem berdasarkan Vision Sumatra dan Rimba. Di area ini, banyak terdapat perkebunan dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Muaro Jambi (luas 95.400 Ha berada di dalam Rimba). Untuk luasan terbesar

perkebunan di luar area Rimba, berlokasi di Kabupaten Batanghari (59,900 Ha) dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (67.000 Ha). Lebih lengkap ada di tabel berikut :

Tabel 2.13. Lokasi Perkebunan dalam Wilayah Jaringan Ekosistem.

Vision	Kabupaten	Perkebunan	Luas (Ha)		
			Dalam Rimba	Luar Rimba	Total
Jaringan Ekosistem	Batanghari	Kebun		59,984.63	59,984.63
	Bungo	Kebun	48,361.89	419.35	48,781.24
	Merangin	Kebun	33,041.50	6,776.85	39,818.35
	Muaro Jambi	Kebun	95,409.63	32,507.15	127,916.78
	Sarolangun	Kebun	3,677.60	54,665.75	58,343.35
	Tanjab Barat	Kebun	43,172.46	67,090.97	110,263.43
	Tanjab Timur	Kebun	35,675.41	15,671.29	51,346.70
	Tebo	Kebun	2,737.96	47,078.43	49,816.39
	(blank)	Kebun		2,571.18	2,571.18
Jaringan Ekosistem Total			262,076.45	286,765.59	548,842.04



Grafik 2.7.

Grafik Luas Perkebunan di Kawasan Jaringan Ekosistem

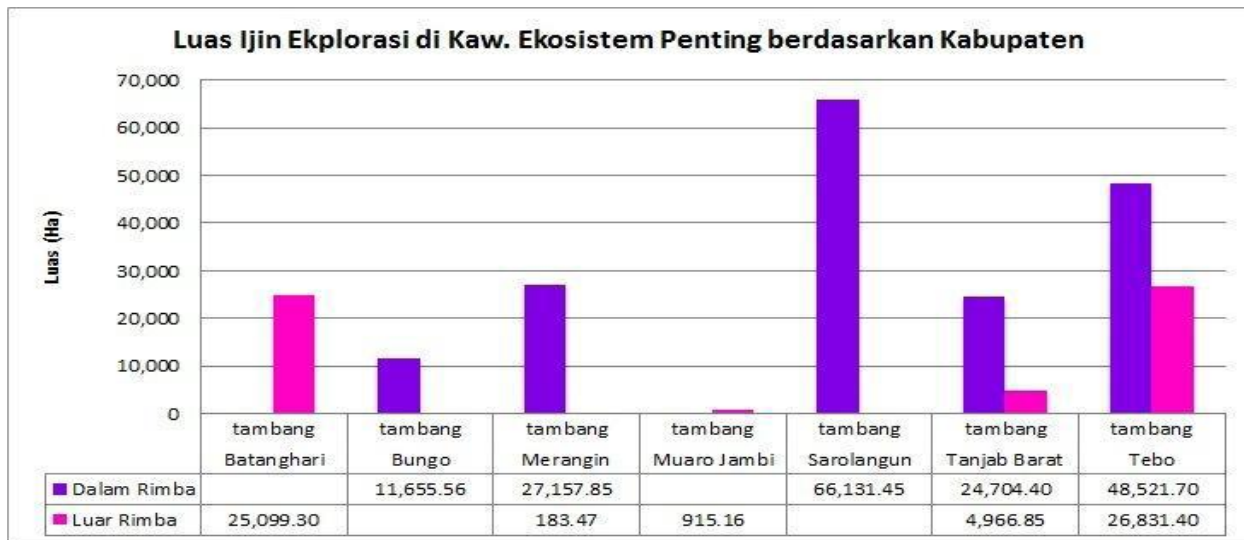
Pada dasarnya, semua perkebunan di area ini perlu menerapkan BMP untuk menuju pengelolaan perkebunan yang lebih lestari dan ramah terhadap kelestarian biodiversity, terutama untuk perkebunan yang berlokasi di area Rimba seperti di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Bungo.

Analisa integrasi peta sebaran ijin tambang (ijin eksplorasi) terhadap Vision Sumatra dan Rimba, data sudah tersedia tetapi karena keterbatasan waktu pengerjaan selama Workshop ini sehingga belum sempat dilakukan (akan disusulkan bersama dengan hasil analisa sebaran HTI dan Perkebunan).

Jenis tambang yang dianalisa adalah emas dan batubara. Data tambang yang digunakan masih berupa ijin ekplorasi sehingga memiliki karakteristik berupa kotak-kotak dengan luas wilayah yang cukup luas. Integrasi data tambang dengan Vision Sumatra dan Rimba ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang terpengaruh oleh ijin eksplorasi dengan melihat pada kelas lahan dari vision sumatra, yaitu kawasan ekosistem penting, kawasan jaringan ekosistem, dan kawasan pembangunan, yang dihubungkan juga dengan lokasi kabupaten di area tersebut. Analisa sebaran ijin eksplorasi tambang terhadap kawasan ekosistem penting berdasarkan Vision Sumatra dan Rimba. Tabel hasil analisa disajikan sbb :

Tabel 2.14. Luas Tambang dalam Kawasan Ekosistem Penting.

Vision	Kabupaten	Tambang	Luas (Ha)		
			Dalam Rimba	Luar Rimba	Total
Kawasan Ekosistem Penting	Batanghari	tambang		25,099.30	25,099.30
	Bungo	tambang		11,655.56	11,655.56
	Merangin	tambang	27,157.85	183.47	27,341.32
	Muaro Jambi	tambang		915.16	915.16
	Sarolangun	tambang		66,131.45	66,131.45
	Tanjab Barat	tambang	24,704.40	4,966.85	29,671.25
	Tebo	tambang	48,521.70	26,831.40	75,353.10
Kawasan Ekosistem Penting Total			178,170.95	57,996.18	236,167.13



Grafik 2.8.

Grafik Luas Perkebunan di Kawasan Jaringan Ekosistem

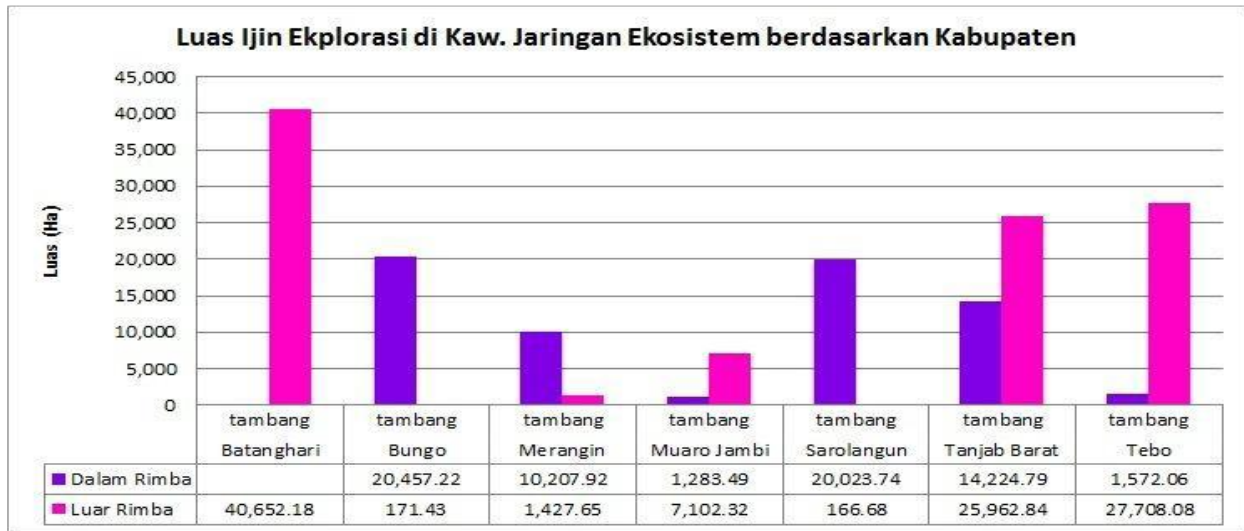
Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa di Kabupaten Sarolangun terdapat area eksplorasi tambang paling luas sekitar 66.131 Ha yang mana area tersebut juga merupakan kawasan Ekosistem Penting berdasarkan Vision Sumatra dan berlokasi di dalam area Rimba. Disamping Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo juga memiliki area peruntukkan untuk tambang yang cukup luas, yaitu sekitar 48.521 Ha di dalam area Rimba dan sekitar 26.831 Ha di luar area Rimba namun sama-sama di dalam kawasan Ekosistem Penting berdasarkan Vision Sumatra.

Analisa sebaran ijin eksplorasi tambang terhadap kawasan Jaringan Ekosistem berdasarkan Vision Sumatra dan Rimba. Tabel sebaran ijin eksplorasi tambang di Kabupaten dalam Provinsi Jambi yang masuk ke dalam kategori Jaringan Ekosistem berdasarkan Vision Sumatra :

Tabel 2.14. Luas Tambang dalam Kawasan Ekosistem Penting.

Vision	Kabupaten	Tambang	Luas (Ha)		
			Dalam Rimba	Luar Rimba	Total
Jaringan Ekosistem	Batanghari	tambang		40,652.18	40,652.18
	Bungo	tambang	20,457.22	171.43	20,628.65
	Merangin	tambang	10,207.92	1,427.65	11,635.57
	Muaro Jambi	tambang	1,283.49	7,102.32	8,385.81

Sarolangun	tambang	20,023.74	166.68	20,190.42
Tanjab Barat	tambang	14,224.79	25,962.84	40,187.63
Tebo	tambang	1,572.06	27,708.08	29,280.14
Jaringan Ekosistem				
Total		67,769.22	103,191.18	170,960.40

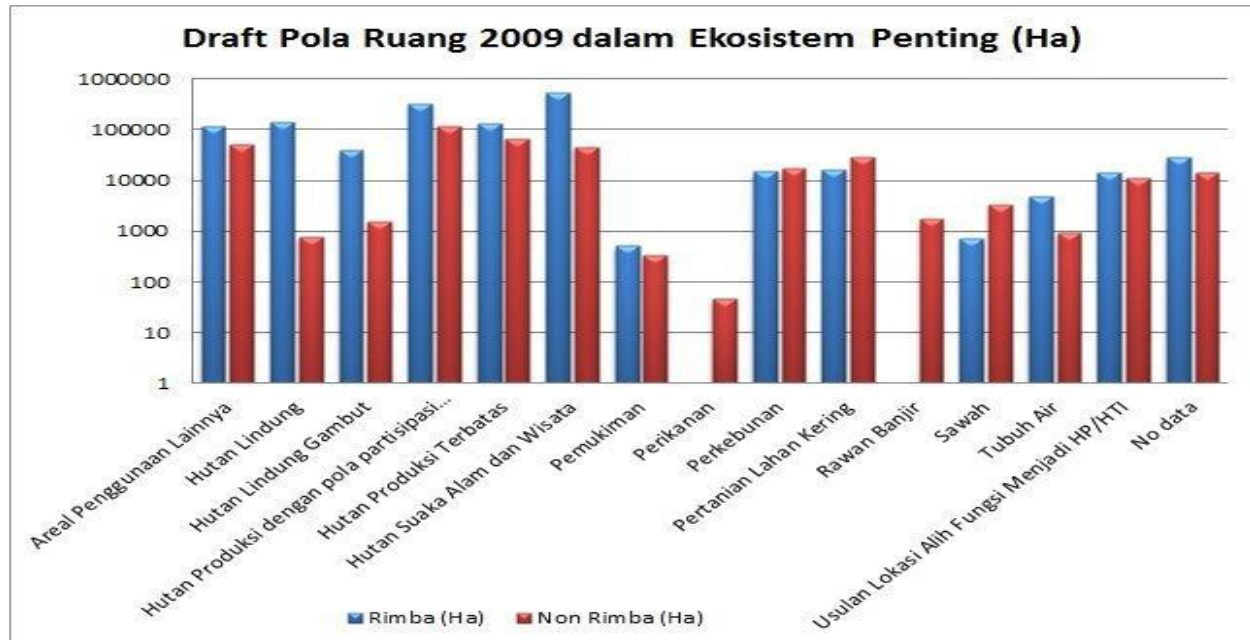
**Grafik 2.7.****Grafik Luas Perkebunan di Kawasan Jaringan Ekosistem**

Di Kabupaten Bungo, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Barat terdapat area ijin eksplorasi yang cukup luas dengan luas masing-masing 20.457 Ha, 20.000 Ha, dan 14.224 Ha (semuanya di dalam area Rimba).

Di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi terdapat ijin eksplorasi yang cukup luas dengan luasan masing-masing 83.500 Ha dan 54.000 Ha. Yang menarik di Kabupaten Sarolangun tidak terdapat area ijin eksplorasi di Kawasan Pembangunan ini tetapi terdapat ijin yang cukup luas di dua kategori lahan yang secara biodiversitas penting yaitu di kategori Ekosistem Penting dan Jaringan Ekosistem.

Analisa integrasi Vision Sumatra dan Rimba dengan draft Pola Ruang prov. Jambi v.2009. Hasil analisa berupa peta-peta berisi informasi sebaran pola ruang v.2009 terhadap 3 kelas dari Vision Sumatra, yaitu Ekosistem Penting (*Important Ecosystem*), Jaringan Ekosistem (*Network*

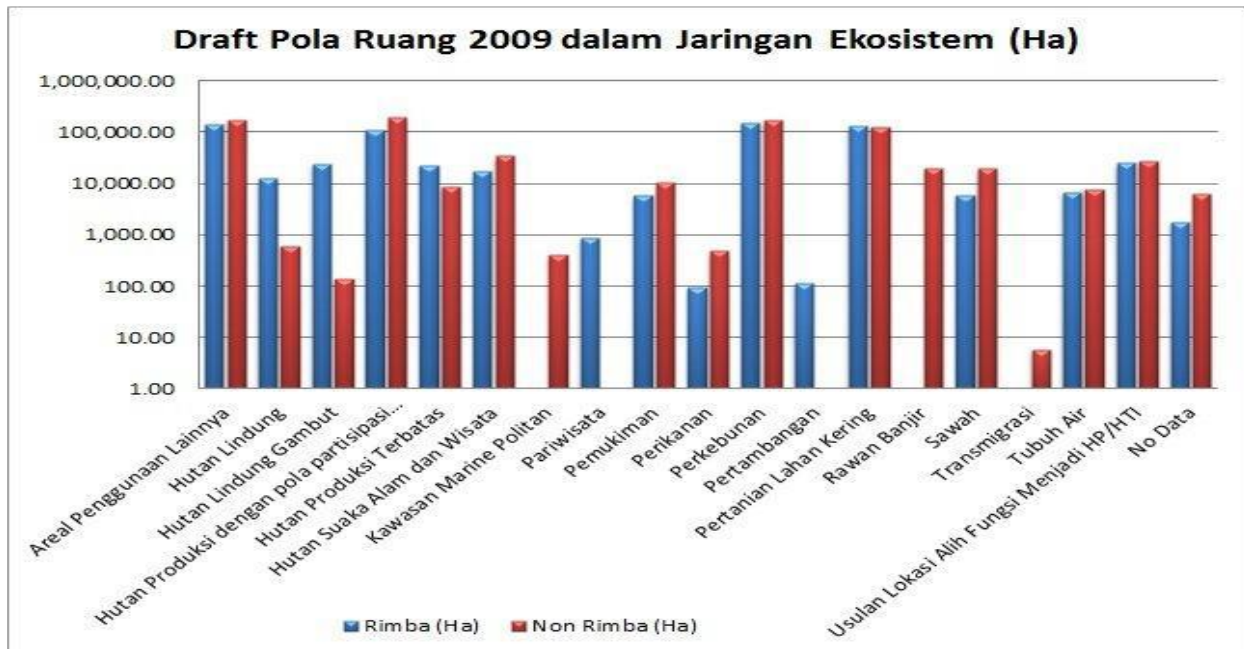
connectivity), dan Kawasan Pembangunan (*Development*), dengan memisahkan pula berdasarkan area yang masuk kedalam wilayah Rimba dan di luar wilayah Rimba.



Grafik 2.8.

Grafik Draft Pola Ruang 2009 Dalam Ekosistem Penting

Dari grafik di atas, yang perlu diperhatikan adalah Pola Ruang „Areal Penggunaan Lainnya” yang memiliki luas 118.900 Ha (dalam Rimba) dan 52.100 Ha (luar Rimba) sehingga total sekitar 171.000 Ha APL yang berlokasi di kawasan Ekosistem Penting menurut Vision Sumatra. Hal ini perlu menjadi catatan dan penting untuk ditentukan bagaimana menentukan strategis operasional terhadap kawasan ini, karena APL akan cenderung menuju konversi hutan alam untuk kepentingan kegiatan ekonomi, sedangkan menurut Vision Sumatra, kawasan ekosistem penting berarti di area tersebut memiliki nilai biodiversity yang tinggi.



Grafik 2.9.

Grafik Draft Pola Ruang 2009 Dalam Jaringan Ekosistem

Di kategori Jaringan Ekosistem, total luas APL sekitar 314.300 Ha, yang terdiri dari 138.100 Ha di dalam Rimba dan 176.200 Ha di luar area Rimba. *Best management practice* sangat penting untuk diimplementasikan di area ini karena area dengan kategori Jaringan Ekosistem memiliki nilai biodiversity yang juga penting.

Analisa integrasi Vision Sumatra dan Rimba dengan draft Pola Ruang Provinsi Jambi v.2011. Hasil analisa berupa peta-peta berisi informasi sebaran pola ruang v.2011 terhadap 3 kelas dari Vision Sumatra, yaitu Ekosistem Penting (Important Ecosystem), Jaringan Ekosistem (Network connectivity), dan Kawasan Pembangunan (Development), dengan memisahkan pula berdasarkan area yang masuk kedalam wilayah Rimba dan di luar wilayah Rimba.

Dengan draft Pola Ruang versi 2011 seperti ini, terlihat sulit untuk menentukan suatu area cocok untuk peruntukkan tertentu karena pembagian pola ruang yang menjadi 3 kategori besar saja walaupun berdasarkan informasi yang didapat, 3 kategori besar ini (konservasi, produksi, dan distribusi) merupakan arahan secara umum, tetap saja untuk keperluan analisa

integrasi dengan Vision Sumatra, informasi arahan lahan yang lebih spesifik dan didukung secara spasial tetap diperlukan.

Setelah diintegrasikan dengan Area Ekosistem Penting, draft pola ruang v.2011 ini memiliki kesesuaian yang tinggi di area barat dari Provinsi Jambi, yang memang di desain untuk kawasan konservasi. Namun hal ini menjadikan area yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi di daerah tengah dan timur Jambi (Bukit Duabelas dan Berbak) menjadi tidak teridentifikasi karena menurut draft pola ruang daerah tengah difokuskan untuk kawasan produksi dan daerah timur untuk kawasan distribusi.

Dari hasil integrasi, terlihat untuk kawasan Jaringan ekosistem banyak bertampalan dengan Kawasan Produksi yang berlokasi di tengah provinsi dan sebagian besar berlokasi di luar area Rimba. Kawasan distribusi juga memiliki luasan yang cukup besar baik di dalam maupun di luar area Rimba.

Strategi operasional di kawasan Jaringan ekosistem terhadap peruntukkan kawasan distribusi dan produksi harus ditentukan secara hati-hati karena jaringan ekosistem merupakan area yang berfungsi sebagai „koridor“ yang menghubungkan kawasan ekosistem penting, sehingga walaupun bila dinilai secara ekosistem tidak setinggi kawasan ekosistem penting tapi fungsinya yang sebagai penghubung menjadikan kawasan ini perlu dikelola secara hati-hati.

Berdasarkan Vision Sumatra, kelas kawasan pembangunan di Provinsi Jambi cenderung berlokasi di bagian tengah Provinsi, sehingga menjadikannya cenderung di luar area Rimba. Untuk kawasan produksi dari draft pola ruang sudah sesuai dengan kelas kawasan pembangunan dari Vision Sumatra.

Analisa integrasi Vision Sumatra dan Rimba dengan draft Struktur Ruang (Rencana pembangunan jalan Trans Sumatera) Provinsi Jambi. Data draft struktur ruang yang dikaji adalah rencana pembangunan jalan tol dan rencana pembangunan jalan kereta api. Berdasarkan peta berikut, rencana pembangunan jalan tol berlokasi melintasi jalur timur Provinsi Jambi dari Kabupaten Muaro Jambi hingga ke Tanjung Jabung Barat. Di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, lintasan jalan tol ini akan sangat berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Tiga puluh. Sementara rencana pembangunan jalan kereta api berlokasi dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Batanghari, hingga Tebo dan Bungo.

Rencana jalan tol dan kereta api dibuffer dengan jarak masing-masing 500, 1000, dan 3000 meter untuk melihat kategori lahan apa saja yang mengalami dampak dari pembangunan jalan tersebut.

Tabel 2.15. Luas Kawasan dan Jaringan Ekosistem.

Status terhadap Rimba	Vision	Kabupaten	Luas (Ha)			
			0 - 500m	1000 - 3000m	500 - 1000m	Total Area
Dalam Rimba	Jaringan Ekosistem Kawasan Penting	Tanjab Barat	2,895.00	10,845.83	2,881.01	16,621.84
		Tanjab Barat	794.56	3,256.05	777.99	4,828.60
		Batanghari	55.66	1,068.26	171.45	1,295.37
Luar Rimba	Kawasan Ekosistem Penting	Muaro Jambi	1,433.19	4,147.88	1,357.06	6,938.13
		Tanjab Barat	2,595.61	11,598.68	2,603.81	16,798.10
		Tanjab Barat	290.38	214.57	264.21	769.16
		Batanghari	224.94	1,480.35	209.41	1,914.70
		Kota Jambi		80.73		80.73
Grand Total	Kawasan Pembangunan	Muaro Jambi	5,660.79	22,819.14	5,653.82	34,133.74
			13,950.12	55,511.51	13,918.75	83,380.38

Secara geografis, lokasi rencana pembangunan jalan tol berhimpitan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh sehingga perlu penganganan yang sangat hati-hati dan dipastikan

dengan adanya jalan ini, kelestarian TN Bukit Tigapuluh ini tidak akan terancam. Sedangkan dari segi kategori lahan, rencana jalan tol yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bertampalan dengan Kawasan Ekosistem Penting dan Jaringan Ekosistem yang merupakan area dengan tingkat keaneka ragaman hayati yang tinggi.

Rencana pembangunan jalan kereta lebih banyak berlokasi di Kawasan Pembangunan berdasarkan Vision Sumatra, karena area ini cenderung datar sehingga ideal untuk pembangunan jalan kereta. Disamping itu kondisi aktual area ini terutama sudah tidak memiliki tutupan hutan alam lagi.

Tabel 2.16. Luas Kawasan dan Jaringan Ekosistem.

Status thd Rimba	Vision	Kabupaten	Luas (Ha)			Total Area	
			0 - 500m	1000 - 3000m	500 - 1000m		
Dalam Rimba	Jaringan Ekosistem	Kota Jambi	0.92		3.57	4.49	
		Muaro					
		Jambi	2,253.57	9,711.61	2,482.75	14,447.93	
		Tanjab Barat	3,656.88	13,663.45	3,553.78	20,874.12	
		Tanjab Timur	669.13	3,967.24	676.19	5,312.55	
		Tebo	29.98	459.04	44.42	533.44	
		Kawasan	Muaro				
		Jambi		132.77		132.77	
		Ekosistem	Tanjab Barat	675.82	3,135.40	792.48	4,603.69
		Penting	Tanjab Timur	265.53	1,297.50	306.35	1,869.38
		Tebo		1,025.39	4,105.93	1,025.04	6,156.35
		Kawasan	Kota Jambi	1.59	53.02	6.92	61.53
		Pembangunan	Muaro				
		Jambi	2,017.80	6,770.01	2,003.68	10,791.49	
		Tanjab Barat	6.66	38.66	5.74	51.06	
Tanjab Timur	0.32	0.2	0.17	0.68			
Tebo	52.33	415.12	59.87	527.32			
No Data	Tanjab Barat		-		-		
Jaringan Ekosistem	Batanghari		78.46		78.46		

	Bungo	10.14	88.89	59.71	158.75
	Kota Jambi	574.04	38.73	190.38	803.15
	Muaro				
	Jambi	3,079.84	7,704.85	3,014.76	13,799.44
	Tanjab Barat	2,629.16	12,865.48	2,605.68	18,100.32
	Tanjab				
Luar	Timur	2,738.13	10,047.33	2,756.98	15,542.45
Rimba	Tebo	461.6	2,627.15	491.72	3,580.46
	Kawasan				
	Ekosistem				
	Penting				
	Muaro				
	Jambi		63.39		63.39
	Tanjab Barat	258.91	201.12	273.22	733.26
	Tanjab				
	Timur	0.04	551.4	1.81	553.24
	Kawasan				
	Pembangunan				
	Batanghari	10,466.06	40,244.30	10,344.96	61,055.32
	Bungo	2,377.80	11,376.26	2,372.16	16,126.21
	Kota Jambi	2,100.72	6,727.60	1,991.78	10,820.10
	Muaro				
	Jambi	3,214.30	14,080.44	3,209.50	20,504.24
	Sarolangun	598.75	3,551.48	686.49	4,836.71
	Tanjab Barat	472.85	2,642.28	533.98	3,649.12
	Tanjab				
	Timur	3,694.46	14,881.35	3,635.80	22,211.61
	Tebo	10,055.68	36,984.21	9,960.16	57,000.04
	No Data				
	Tanjab Barat		151.23		151.23
	Tanjab				
	Timur		105.07		105.07
Grand	Total	53,388.38	208,760.94	53,090.04	315,239.36

III. PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP

3.1. PEMBAGIAN URUSAN

Dalam penyusunan RAD GRK ini untuk menentukan prioritas mitigasi maka dibagi atas sumber emisi berdasarkan sektoral. Prioritas didasarkan oleh potensi emisi serta kemungkinan pengurangannya yang terbesar hingga yang terkecil. Potensi emisi dan pengurangan dihitung berdasarkan jumlah emisi yang memungkinkan terjadi serta penanggulangannya. Berdasarkan urusan sektoral maka prioritas untuk dimitigasi yang utama secara berurutan adalah sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian (perkebunan), energi dan transportasi, pertanian (tanaman pangan dan peternakan), serta industri dan limbah.

Tabel 3.1.
Pembagian Sektor, Kewenangan, Administrasi dan Lokasi Pengelolaan Mitigasi GRK

No	Sektor	Kewenangan			Administrasi	Lokasi
		Pusat	Prov	Kab/kot		
1.	Kehutanan dan Lahan	V	V	V	Provinsi	11 kab/kota
2.	Pertanian Pangan		V	V	Provinsi	11 kab/kota
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	V	V	V	Provinsi	9 kabupaten
4.	Perkebunan	V	V	V	Provinsi	9 kabupaten
5.	Peternakan		V	V	Provinsi	11 kab/kota
6.	Industri dan Limbah		V	V	Provinsi	11 kab/kota

3.2. RUANG LINGKUP DAERAH

Emisi dapat dihasilkan oleh pembuatan kebijakan pembangunan yang didasarkan oleh produk yang dihasilkan maupun aktivitas masyarakat pelaku usaha. Semua sumber emisi perlu diidentifikasi sehingga upaya mitigasi dapat direncanakan sesuai dengan sumbernya. Adapun sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai identifikasi awal dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Identifikasi Awal Sumber Emisi GRK

Bidang	Potensi Sumber Emisi	
	Pemerintahan Daerah	Masyarakat/Pelaku Usaha
Kehutanan dan Lahan Gambut		
Sumber Data:		
Bappeda, Dinas Kehutanan, BKSDA, Litbang Kehutanan, Jambi Dalam Angka, Lemlit Unja	Pemberian izin usaha, Alih Fungsi Lahan	Pembukaan Lahan Usaha, dan peladangan
Pertanian		
Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Lemlit Unja, DNPI	Peruntukkan Penggunaan Lahan dalam RTRW	Pembukaan Lahan dengan pembakaran
Energi		
Dinas ESDM, PLN, AKLI, BPS, Jambi Dalam Angka	Jumlah dan kapasitas pembangkit listrik yang terkoneksi maupun yang belum terkoneksi, Pemakaian BBM untuk pembangkit listrik, Energi alternative	Pemakaian BBM dan energy alternative yang digunakan, pemakaian listrik diluar PLN
Transportasi		
Dinas Perhubungan, Kantor Samsat, Dinas PU, Pertamina, BPS dan Jambi Dalam Angka	Jumlah, jenis, umur kendaraan. Kondisi jalan di Provinsi Jambi,	Kepemilikan kendaraan
Industri		
Sumber Data : Dinas Perindustrian, BLHD, BPS, Jambi Dalam Angka, Pertamina		Emisi Asap dan limbah perusahaan, dan pelaku usaha kecil
Pengelolaan Limbah		
Sumber Data: Dinas PU, BLHD, BPS, Jambi Dalam Angka	Limbah Pasar Pemerintah,	Limbah masyarakat, Limbah Industri

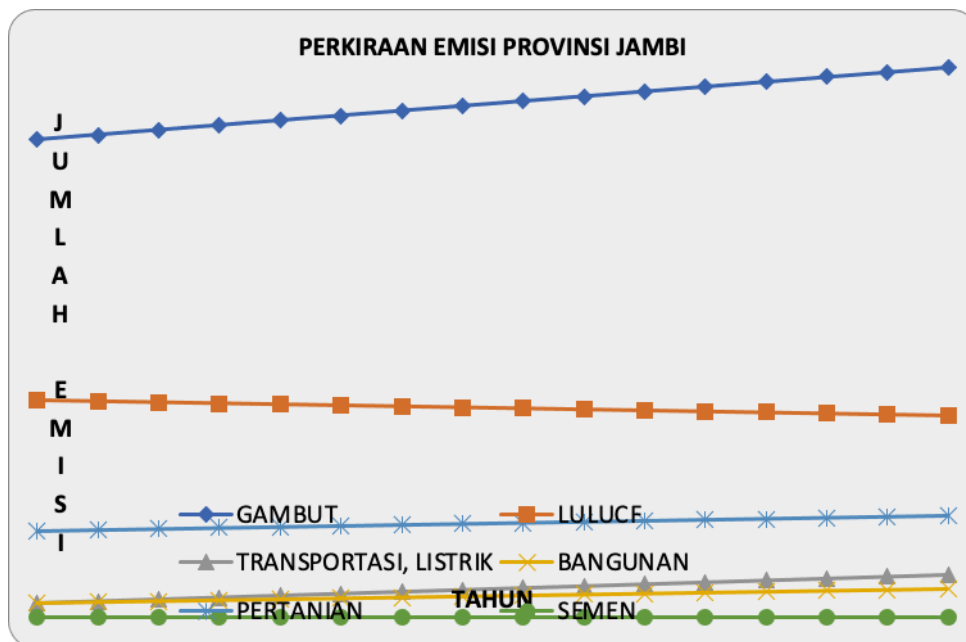
Untuk mengetahui kemungkinan mitigasi emisi yang tertuang dalam produk kebijakan, maka dilakukan identifikasi kebijakan pemerintah daerah yang dimulai dari Rencana *Bappeda Provinsi Jambi*

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 -2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Identifikasi kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi GRK dapat dilihat pada Tabel.3.3 sebagai berikut :

IV. ANALISIS EMISI GRK

4.1. BASELINE EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI JAMBI

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa ***Dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030.*** Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCo₂e¹– setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.



Grafik 4.1. Perkiraan Emisi GRK Jambi

4.2. AKSI MITIGASI BERDASARKAN RENSTRA SKPD TERKAIT

Bidang : Transportasi

Sub Bidang : Transportasi Darat

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi	Aksi Mitigasi II
		Pelatihan sosialisasi Smart I Driving (eco Driving)	Penerapan smart Card di terminal Type A
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)		0,002	0,002
Biaya Mitigasi		600.000	16.519.000
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)		300.000.000	8.259.500.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		Ketertiban berlalulintas	Ketertiban berlalulintas
		Penurunan emisi CO2 dan logam berat (Timbal/Pb)	Mengurangi kemacetan
			Pengurangan Emisi CO2
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Sedang
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi III	Aksi Mitigasi IV
		Pembangunan Sistem Bus Rapid transit (BRT/Semi BRT)	Penerapan standar emisi kendaraan bermotor
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)		0,69	0,3
Biaya Mitigasi		13.800.000.000	307.500.000
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)		20.000.000.000	1.025.000.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		Ketertiban berlalulintas	Pengurangan Emisi CO2 dan logam berat dari kendaraan yang sudah tua
		Penurunan emisi CO2 dan logam berat (Timbal/Pb)	Mengurangi kemacetan
			Pengurangan Emisi CO2
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi mahal	Layak teknik, sosial, ekonomi

Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Sedang	Sedang
-----------------	----------------------	--------	--------

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi V	Aksi Mitigasi VI
		Penerapan Pengendalian Dampak Lalu lintas (Traffic Impact Control/ITC)	Sosialisasi Peremajaan armada angkutan umum
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)		0,24	0,36
Biaya Mitigasi		3.616.005.600	36.000.000
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)		15.066.690.000	100.000.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		AMDAL Lalulintas	Pengurangan emisi CO2
		Pengurangan kemacetan lalulintas	Penertiban lalulintas
		Mengurangi pemborosan BBM	Penghematan BBM
		Mengurangi emisi CO2	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat Prospektif	Sangat Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi VII
		Pembangunan ITS (Intelligent Transport System)
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)		0,27
Biaya Mitigasi		3.780.000.000
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)		14.000.000.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		Pembangunan alat lengkap ITC
		Penertiban lalulintas
		Mengurangi kemacetan
		Penghematan BBM
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Kurang Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Rendah

Bidang : Pekerjaan Umum
Sub Bidang :

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi I	Aksi Mitigasi II
		Perbaiki jaringan irigasi dilahan gambut	Pembangunan Jaringan Irigasi
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq		
Biaya Mitigasi	Rp/Juta		
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton		
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		Meningkatkan Kesuburan lahan	Meningkatkan Kesuburan lahan
		Mengurangi karbon terlepas ke udara	Mengurangi karbon terlepas ke udara
		Mengurangi dekomposisi gambut menjadi CH4	Mengurangi dekomposisi dan mengurangi dekomposisi gambut menjadi CH4
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Sangat prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Bidang : Limbah Industri
Sub Bidang :

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi I	Aksi Mitigasi II
		Meningkatkan baku mutu limbah cair pabrik	Pengawasan dan audit lingkungan
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq		
Biaya Mitigasi	Rp/Juta		
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton		
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		Melakukan pengolahan instalasi pengelola air limbah secara komunal	Melakukan pengolahan instalasi pengelola air limbah secara komunal
		Mengurangi pencemaran air secara biologis, fisik, kimiawi	Mengurangi pencemaran air secara biologis, fisik, kimiawi

		Mengurangi dekomposisi air sehingga CO2 dan CH4 berkurang diudara	Mengurangi dekomposisi air sehingga CO2 dan CH4 berkurang diudara
		Meningkatkan mamfaat perairan/estetika	Meningkatkan mamfaat perairan/estetika
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Sangat prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Bidang : Pertanian
Sub Bidang : Peternakan

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi I	Aksi Mitigasi II
		Integrasi ternak tanaman pangan	Integrasi ternak-perkebunan pangan
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq		
Biaya Mitigasi	Rp/Juta		
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton		
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		Menciptakan usaha tani Zerro waste	Menciptakan usaha tani Zerro waste
		Pengurangan sumber emisi CH4 dari ternak dan CO2 dari tanaman	Pengurangan sumber emisi CH4 dari ternak dan CO2 dari tanaman
		Meningkatkan efisiensi usaha	Meningkatkan efisiensi usaha
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Sangat prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi III	Aksi Mitigasi IV
		Implementasi Biogas	Pembuatan Pupuk Kandang
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq		
Biaya Mitigasi	Rp/Juta		
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton		

Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		Pengurangan emisi CH4 dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pengganti BBM dan tenaga listrik di pedesaan	Pengurangan emisi CH4 yang tidak terlalu besar dibanding Biogas
		Gas CH4 dapat terkonversi menjadi CO2 (yang angka emisinya lebih kecil dari CH4) dan uap air	Gas CH4 tidak termamfaatkan sehingga menjadi sumber emisi di atmosfer
		Meningkatnya sanitasi lingkungan dari feses sapi	Produk akhir hanya berupa pupuk kandang
		Meningkatnya produktivitas usaha ternak dengan adanya limbah organik dari pembuatan Biogas sebagai pupuk organik siap pakai	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Kurang prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, keuntungan rendah, implementasi rendah
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Rendah

Bidang : KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
Sub Bidang : KEHUTANAN

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi I	Aksi Mitigasi II
		Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 1 Unit dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 2 Unit (20 % target nasional).	Fasilitasi dan pengawasan pembangunan KPHL Model dan KPHP Model di Provinsi Jambi.
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	0,79	0,2
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	2.068.890.000	663.600.000
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	2.618.848.101	3.318.000.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, mampu mengurangi degradasi dan kerusakan sumber daya hutan		Meningkatkan pengelolaan hutan sampai tingkat tapak.	Meningkatnya kelestarian hutan.
		Meningkatnya fungsi kawasan hutan.	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan.

Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Sangat prospektif
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi III	Aksi Mitigasi IV
		Restrukturisasi industri hutan	Pengendalian pemanfaatan kawasan hutan
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	1,95	2,2
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	2.049.999.999	2.699.998.400
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	1.051.282.051	1.227.272.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, pemanfaatan kawasan hutan yang sesuai dengan azas kelestarian		Peningkatan fungsi produksi sesuai dengan prinsip kelestarian	Pengendalian pemenuhan kebutuhan bahan baku.
		Pemanfaatan sumber daya hutan yang ramah lingkungan.	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Sangat prospektif
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi V	Aksi Mitigasi VI
		Kegiatan pengukuran perubahan kawasan hutan kaitannya dengan REDD.	Pemantauan pelaksanaan kegiatan REDD
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	0	0
Biaya Mitigasi	Rp/Juta		-
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	-	-
Konsisten dengan lingkungan hidup, terpantaunya		Perubahan kawasan hutan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.	Pengembangan dan pemanfaatan hutan yang sesuai dengan ketentuan/ prinsip kelestarian.

perubahan kawasan hutan		Data kawasan hutan yang menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan.	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kuantitatif	Nominal	Nominal
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi VII	Aksi Mitigasi VIII
		Pelaksanaan batas kawasan hutan sepanjang 2.048 Km	Pemantauan dan pengawasan penataan batas kawasan hutan.
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	10,11	5,05
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	2.633.999.994	3.677.183.997
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	260.534.124	728.155.247
Konsisten dengan lingkungan hidup, terpeliharanya sumber daya hutan		Mengurangi permasalahan kawasan hutan	Terjaganya potensi sumber daya hutan
		Terpeliharanya luasan kawasan hutan	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kuantitatif	Nominal	Nominal
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi IX	Aksi Mitigasi X
		Kegiatan penanaman pohon dalam rangka Rehabilitasi hutan dan lahan	Pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	4,03	0,41
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	60.452.699.999	4.999.999.610
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	15.000.669.975	12.195.121.000
Konsisten dengan lingkungan hidup,		Mengurangi lahan kritis	Terjaga/ terpeliharanya produktivitas lahan

meningkatkan kualitas lingkungan		Meningkatkan ruang terbuka hijau	Menghindari bencana alam
		Menjaga/ memelihara kelestarian DAS	
		Meningkatkan fungsi hutan	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kuantitatif	Nominal	Nominal
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi XI	Aksi Mitigasi XII
		Kegiatan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa.	Fasilitasi dan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat.
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	4,07	2,35
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	3.599.999.659	2.149.999.960
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	884.520.800	914.893.600
Konsisten dengan lingkungan hidup, harmonisasi pengelolaan sumber daya hutan dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan produktifitas hutan
		Meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi hutan	
		Terjaganya sumber daya hutan	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospek	sangat prospek
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi XIII	Aksi Mitigasi XIV
		Peringatan dini kejadian kebakaran hutan.	Kampanye pencegahan kebakaran hutan
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	1,99	1,5

Biaya Mitigasi	Rp/Juta	4.649.999.966	3.354.999.900
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	2.336.683.400	2.236.666.600
Konsisten dengan lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup.		Antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan	Meningkatkan kewaspadaan bahaya kebakaran hutan
		Persiapan teknis, sdm dan sarpras penanggulangan kebakaran hutan.	Kesiagaan semua pihak akan bahaya kebakaran hutan.
		Terjaganya sumber daya hutan	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospek	sangat prospek
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi XV	Aksi Mitigasi XVI
		Penindakan hukum terhadap pelanggaran dibidang kehutanan.	Sosialisasi pencegahan pelanggaran hukum dibidang kehutanan.
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	0,23	0,15
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	4.199.999.985	2.499.900.000
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	18.260.869.500	16.666.000.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, pencegahan dan ketaatan terhadap ketentuan dibidang lingkungan hidup.		Rendahnya pelanggaran ketentuan dibidang kehutanan	Meningkatkan pemahaman semua pihak tentang ketentuan dibidang kehutanan.
		Terpelihara dan terjaganya sumber daya hutan.	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospek	sangat prospek
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi XVII	Aksi Mitigasi XVIII
		Kegiatan patroli pengamanan kawasan hutan	Kegiatan monitoring dan evaluasi perlindungan hutan.
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	6,59	1,65
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	19.999.997.590	3.999.600.000

Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	3.034.901.000	2.424.000.000
Konsisten dengan lingkungan hidup, menjaga kelestarian hutan.		Menjaga keamanan sumber daya hutan	Strategi perlindungan sumber daya hutan.
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospek	sangat prospek
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi IXX	Aksi Mitigasi XX
		Kegiatan pembangunan hutan tanaman	Kegiatan pembinaan silvikultur hutan tanaman
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)	Ton CO2 eq	8,4	1,68
Biaya Mitigasi	Rp/Juta	34.349.999.999.280	4.579.999.999.999
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)	Rp/Ton	4.089.285.714.200	2.726.190.476.190
Konsisten dengan lingkungan hidup, penggunaan sumber daya hutan secara efektif dan efisien.		Peningkatan produksi hasil hutan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan produktivitas lahan
		Pemenuhan bahan baku kayu	
		Meningkatkan pendapatan	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kuantitatif	Nominal	Nominal
Kelayakan: teknik, ekonomi, sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Bidang : Lahan
Sub Bidang : Pertanian

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi I	Aksi Mitigasi II
		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/Perkebunan

Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Sedang

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi III	Aksi Mitigasi IV
		Program perlindungan dan konservasi SDA	Program pemanfaatan pupuk organik dan bio pestisida dan budidaya tanaman untuk mencegah laju peningkatan emisi GRK melalui penggunaan UPPO
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi mahal	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Sedang	Sedang

Bidang : Energi

Sub Bidang : Energi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi I	Aksi Mitigasi II
		Reklamasi Tambang Batu bara	Pembangunan PLTMH
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Sedang

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi III	Aksi Mitigasi IV
		Biogas	PLTS Komunal
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			Pengurangan Emisi CO2
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi mahal	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Sedang	Sedang
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi V	Aksi Mitigasi VI
		PLT Panas Bumi	PLTA Kerinci
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			

Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat Prospektif	Sangat Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi VII	Aksi Mitigasi VIII
		Mini LPG Plant	Desa Mandiri Energi (Biofuel)
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
		Mengurangi emisi CO2	
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Kurang Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Rendah	Sedang
Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi V	Aksi Mitigasi VI
		Pemamfaatan gas Flare untuk pembangkit	Gasifikasi Batubara

Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat Prospektif	Sangat Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi VII
		PLTU Samaran
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)		
Biaya Mitigasi		
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)		
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		
		Mengurangi emisi CO2
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Kurang Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Rendah

Bidang : Lahan

Sub Bidang : Perkebunan

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi I	Aksi Mitigasi II
		Pembukaan Lahan tanpa Bakar	Replanting Karet dan penanaman Baru
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			Pengurangan Emisi CO2
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Sedang

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi III	Aksi Mitigasi IV
		Replanting sawit dan penanaman baru	Integrasi Sawit-ternak Sapi
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi mahal	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Sedang	Sedang

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi V	Aksi Mitigasi VI
		Integrasi karet-ternak	Penggantian bibit kelapa sawit palsu (tidak bersertifikat) menjadi bibit unggul
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Sangat Prospektif	Sangat Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kualitatif	Layak teknik, sosial, ekonomi	Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Tinggi	Tinggi

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi VII	Aksi Mitigasi VIII
		Bantuan bibit: kelapa,kopi,tembakau, kakao,kayu manis, Nilam, Tebu	Rencana Pengembangan tanaman Pala, jarak pagar, kemiri dan teh
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)			
Biaya Mitigasi			
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)			
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll			
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif	Prospektif

panjang			
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Kurang Layak teknik, sosial, ekonomi	Kurang Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Rendah	Rendah

Kriteria	Satuan	Aksi Mitigasi IX
		Peta/foto Udara
Potensi Mitigasi (Jumlah Penurunan Emisi)		
Biaya Mitigasi		
Biaya Mitigasi (Biaya Penurunan Emisi per ton CO2 eq)		
Konsisten dengan lingkungan hidup, misalnya berpotensi mengurangi polusi udara, dll		
Keberlanjutan pilihan secara jangka panjang	Kualitatif	Prospektif
Kelayakan: teknik, Ekonomi, Sosial	Kuantitatif	Kurang Layak teknik, sosial, ekonomi
Hasil Penilaian	Tinggi/sedang/rendah	Rendah

4.3. Trend mitigasi persektor

Sub Sektor	Aksi Mitigasi	Satuan	Biaya Mitigasi ((Rp) dalam Juta	Penurunan emisi (ton CO2eq)
Kehutanan	1. Pembangunan KPHP/KPHL	3 unit	2.068	0,79
	2. Fasilitasi dan pengawasan		663	0,20
	3. Restrukturisasi industri hutan		2.050	1,95
	4. Pengendalian pemamfaatan kawasan hutan		2.700	2,20
	5. Pelaksanaan batas kawasan	2.048 km	2.634	10,11
	6. Pemantauan dan pengawasan penataan batas kawasan hutan		3.677	5,05
	7. Kegiatan penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi hutan		60.493	4,03
	8. Pemantauan Monev RHL		5.000	0,41

	9. Kegiatan Hkm, HTR, dan HD		3.600	4,07
	10. Peringatan dini Kejadian kebakaran hutan		3.555	1,50
	11. Kampanye pencegahan kebakaran hutan		4.200	0,23
	12. Penindakan hukum pelanggaran bidang kehutanan		2.500	0,15
	13. Sosialisasi pencegahan pelanggaran hukum di bidang kehutanan		20.000	6,59
	14. Patroli pengamanan kawasan hutan		4.000	1,65
	15. Monev perlindungan hutan			
	16. Pembangunan hutan tanaman		34.350	8,40
	17. Pembinaan silvikultur hutan tanaman		4.580	1,68
	18. Moratorium gambut	14.000 ha		4,479
	Total		156.070	53.489

Sub Sektor	Aksi Mitigasi	Satuan	Biaya Mitigasi ((Rp) dalam Juta	Penurunan emisi (juta ton CO ₂ eq)
Perkebunan	1. Pembukaan lahan tanpa bakar	870.000 ha		13,929
	2. Replanting karet dan penanaman baru	120.000 ha		85,417
	3. Replanting sawit dan penanaman baru	750.000 ha		2,714
	4. Integrasi sawit-ternak sapi	20 kelompok		1,950
	5. Integrasi karet-ternak			
	6. Penggantian bibit kelapa sawit			
	7. Bantuan bibit; Kelapa, kopi, tembakau, kakao, kayu manis, nilam, tebu			
	8. Rencana pengembangan tanaman pala, jarak pagar, kemiri dan teh			
	9. Peta/foto udara			
	Total			104,0537

Sub Sektor	Aksi Mitigasi	Satuan	Biaya Mitigasi (Rp) dalam Juta	Penurunan emisi (ton CO ₂ eq)
Pertanian-Peternakan	1. Integrasi ternak tanaman pangan	20 Kelompok		1,950

	2. Integrasi ternak perkebunan	110 unit		0,0088
	3. Implementasi Biogas			
	4. Pembuatan pupuk kandang			
	5. Penggunaan Biopestisida di lahan pangan			0,1336
	6. Pengembangan Jaringan irigasi			1,988
	7. Pembukaan lahan pangan tanpa bakar	45.000 ha		5,343
	8. Konservasi air (Embung)	334.000 ha		
	Total		156.070	7,464

Sub Sektor	Aksi Mitigasi	Satuan	Biaya Mitigasi ((Rp) dalam Juta)	Penurunan emisi (ton CO ₂ eq)
Energi	1. Reklamasi Tambang Batubara	15 unit	12.500	2,75084
	2. Pembangunan PLTMH	69 unit	1.585	0,11849
	3. Biogas	1 unit		0,01615
	4. PLTS Komunal	1 unit		
	5. PLTA Kerinci	1 unit		
	6. Mini LPG Plant			
	7. Desa Mandiri Energi			
	8. Pemamfaatan Gas Flare untuk pembangkit			
	9. PLTP Panas Bumi			
	10. Gasifikasi Batubara			
	11. PLTU Samaran			
	12. City Gas	4000 Sambungan		
	Total		14.085	2,8855

Sub Sektor	Aksi Mitigasi	Satuan	Biaya Mitigasi ((Rp) dalam Juta)	Penurunan emisi (Juta ton CO ₂ eq)
Transportasi	1. Pelatihan sosialisasi Smart I Driving (eco driving)		300	0,002
	2. Penerapan smart Card di terminal type A		8.259	0,002
	3. Pembangunan Sistem Bus Rapid Transit (BRT/Semi BRT)		20.000	0,69
	4. Penerapan standar Emisi kendaraan bermotor		1.025	0,3
	5. Penerapan Pengendalian Dampak Lalu Lintas (Traffic Impact Control/ITC)		15.066	0,24
	6. Sosialisasi Peremajaan		100	0,36

	armada angkutan umum 7. Pembangunan ITS (Intelligent Transport System)		14.000	0,27
	Total		156.070	1,864

Sub Sektor	Aksi Mitigasi	Satuan	Biaya Mitigasi ((Rp) dalam Juta)	Penurunan emisi (Juta ton CO ₂ eq)
Limbah dan Industri	1. Sanitary Landfill 2. Penerapan sistem audit lingkungan 3. Penerapan Produksi bersih			
	Total			0,02

4.4. Kumulatif emisi semua sektor

No	Sektor	Jumlah mitigasi (Mton CO ₂ eq)
1	Kehutanan	53,489
2	Gambut	
3	Perkebunan	10,405
4	Pertanian-peternakan	7,464
5	Energi	2,886
6	Transportasi	1,864
7	Limbah	0,020
	total	76,128

4.5. Analisis penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Jambi.

Berdasarkan perhitungan DNPI 2010 Jambi memiliki potensi untuk menurunkan emisi GRKnya sampai dengan 55 MtCO₂e hingga tahun 2030, sementara berdasarkan perhitungan SKPD terkait sebesar 38,218 MtCO₂eq dengan perpaduan yang tepat antara kebijakan dalam negeri dan dukungan internasional. Dari kemungkinan-kemungkinan penurunan ini, 48 persen datang dari upaya-upaya terkait konservasi lahan gambut dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF. Lima peluang penurunan karbon terbesar mewakili 80 persen total potensi

pengurangan Jambi : (1) Mencegah pembakaran hutan dan lahan gambut; (2) Mengurangi deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang efektif, kebijakan alokasi lahan dan dengan meningkatkan produktivitas pertanian; (3) Merehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau rusak; (4) Mengelola hutan secara lestari; dan (5) melakukan reboisasi.



Grafik 4.2. Mitigasi DNPI

Sumber-sumber pertumbuhan (rendah karbon) akan diperlukan untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Jambi

Untuk menjadikan perekonomian Provinsi Jambi ke arah pertumbuhan rendah karbon, maka upaya-upaya mitigasi harus dipadukan dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan sumber penghidupan yang berkelanjutan kepada penduduk setempat. Enam peluang pertumbuhan diberikan prioritas berdasarkan

potensi dampak mereka (arti pentingnya saat ini bagi PDB, pertumbuhan masa mendatang, kualitas pekerjaan, dan implikasi untuk emisi karbon) dan kelayakan mereka (yaitu, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan lingkungan usaha saat ini); (1) Hasil perkebunan pada lahan non-hutan; (2) Tanaman pangan pada lahan non-hutan; (3) Kehutanan yang lestari; (4); Ekowisata (5) Budidaya perikanan ; dan (6) Layanan Finansial.

Diperlukan kelembagaan yang dapat mengkoordinir kegiatan pertumbuhan rendah karbon Jambi, terutama untuk kegiatan meliputi enam wilayah fungsional inti: (1) Menarik, mengelola dan mendistribusikan pembiayaan internasional untuk pembangunan rendah karbon secara transparan, adil dan efisien ; (2) Memberikan dukungan teknis untuk menetapkan garis dasar/baseline tingkat provinsi dan standar yang tepat untuk pemantauan, pelaporan dan verifikasi; (3) Mengembangkan tanggapan pengaturan untuk menangani isu-isu penting secara perencanaan tata ruang dan kepemilikan lahan; (4) Memulai proses-proses untuk melibatkan masyarakat lokal, mendorong perubahan perilaku dan membangun penyelenggaraan oleh masyarakat local; (5) Mengembangkan prasarana penting untuk mendukung penurunan emisi dan sumber penghidupan yang berkelanjutan; dan (6) Merancang strategi-strategi dengan sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan dan investasi sesuai prioritas pertumbuhan yang telah diidentifikasi.

1. Konteks pertumbuhan rendah karbon

Berdasarkan analisis DNPI Jambi menghadapi tantangan yang besar pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pendapatan rata-ratanya sepertiga lebih rendah dari rata-rata pendapatan Indonesia, dan sangat bergantung pada dua industri utama (pertanian dan LULUCF yang berkontribusi atas sekitar 30 persen pendapatan dan 58 persen pekerjaan), yang telah dengan cepat kehilangan lapangan pekerjaan (76.000 kehilangan lapangan pekerjaan netto antara tahun 2003-2006). Dengan demikian, pemerintah Jambi sewajarnya fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber penghidupan masyarakatnya. Namun demikian pada saat yang sama, Jambi mengambil peranan utama dalam memberantas sumber-sumber antropogenik perubahan iklim, khususnya yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan.

Provinsi Jambi memiliki komitmen untuk bergerak menuju jalur pembangunan yang selaras dengan iklim, yang menyesuaikan pembangunan ekonomi dengan penurunan perubahan iklim. Pembangunan yang selaras dengan iklim memiliki potensi untuk memperluas dasar perekonomian Jambi, mengurangi ketergantungan pada ekspor sumber daya primer dan meningkatkan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi para petani rakyat dan masyarakat hutan. Untuk mencapai pembangunan yang selaras dengan iklim akan diperlukan perubahan yang besar terhadap struktur perekonomian Jambi, perencanaan penggunaan lahan dan kebijakan pemerintah. Diperlukan pula pola pikir yang baru yang terfokus pada pembangunan ramah lingkungan jangka panjang di dalam pemerintahan, masyarakat bisnis, dan sektor nirlaba.

Strategi pertumbuhan rendah karbon yang dijelaskan dalam laporan ini merupakan langkah awal dalam proses yang jauh lebih panjang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Jambi yang berkelanjutan. Terdapat tiga elemen inti, yaitu :

- **Mitigasi CO₂**: Mengestimasi ukuran emisi saat ini dan masa mendatang; menilai potensi pengurangan teknis dan kelayakan sarana pengurangan; mengembangkan rencana aksi untuk menangkap peluang-peluang pengurangan prioritas
 - **Pembangunan Ekonomi** : Menganalisis kekuatan dan kelemahan kompetitif yang ada; memprioritas peluang-peluang pertumbuhan berdasarkan dampak (termasuk dampak ekonomi dan lingkungan) dan kelayakan; mengembangkan rencana aksi untuk menangkap peluang-peluang pertumbuhan prioritas
 - **Faktor-faktor pendukung kelembagaan** : Mengembangkan strategi bagi pendukung-pendukung penting yang akan menyokong keberhasilan strategi pertumbuhan rendah karbon (misalnya: lembaga-lembaga baru, pemantauan dan evaluasi, mekanisme distribusi finansial, perencanaan tata ruang).
2. **Peluang-peluang pengurangan emisi di Provinsi Jambi memiliki potensi yang besar dalam pengurangan karbon.**

Jambi memiliki potensi untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya sampai dengan 55 MtCO₂e hingga tahun 2030, dengan perpaduan yang tepat antara kebijakan dalam negeri

dan dukungan internasional. Dari kemungkinan-kemungkinan penurunan ini, 48 persen dapat berasal dari upaya-upaya terkait dengan konservasi lahan gambut dan 38 persen berasal dari sektor LULUCF

Lima peluang penurunan karbon mewakili lebih dari 85 persen dari total potensi pengurangan Provinsi Jambi. Peluang ini dideskripsikan secara lebih mendetail.

1. Mencegah pembakaran hutan dan lahan gambut

Pencegahan pembakaran hutan memiliki potensi terbesar untuk menurunkan emisi Jambi dimana biaya kemasyarakatannya relatif rendah, yaitu dibawah USD 12 setiap tCO₂e yang berkurang (belum termasuk biaya-biaya pelaksanaan).

Penurunan emisi yang utama dapat dicapai melalui mengurangi emisi dari pembakaran hutan dengan melarang pembakaran sebagai alat untuk persiapan lahan, menyediakan teknologi yang tepat dan praktis (dan dimungkinkan pula insentif finansial) untuk pembersihan lahan manual, mengembangkan sistem peringatan dini yang berdasarkan status resiko kebakaran dan deteksi kebakaran berbasis lapangan, memperkuat pasukan pemadam kebakaran memastikan pelaksanaan yang kuat dan denda yang besar untuk pelanggaran aturan, dan membangun kesadaran publik akan akibat ekonomi dan sosial dari kebakaran hutan di provinsi. Saat ini terdapat kemitraan antara Provinsi Jambi, Singapore's National Environment Agency dan Asia Pacific Resource International (APRIL) untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan di salah satu kabupaten di Jambi, dimana mampu menyediakan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat untuk merancang pendekatan tingkat provinsi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Muaro Jambi antara pemerintah Provinsi Jambi, Singapore National Environment Agency dan Asia Pacific Resource International Ltd (APRIL). Pengkajian lapangan yang singkat dan lokakarya diadakan untuk mengidentifikasi penyebab utama kebakaran dan mengembangkan rencana aksi untuk mengatasi isu-isu ini. Pengkajian lapangan singkat menemukan bahwa drainase yang tidak dikontrol; penebangan liar dan pelanggaran lahan telah menyebabkan dan terus merusak lahan gambut, yang merupakan sumber asap dan kabut terbesar di Kabupaten ini. Pembakaran telah

dilakukan secara luas dan diterima untuk pembersihan lahan oleh para petani perorangan dalam komunitas kecil dan alternatif rendah biaya, dari pembakaran (misalnya teknik-pembersihan lahan mekanis) umumnya tidak tersedia. Desa-desa setempat juga didapati memiliki kemampuan terbatas untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, dengan pelatihan yang terbatas, kurangnya system peringatan dini dan perlengkapan pemadaman kebakaran adalah masalah utama. Rekomendasi akhir menekankan bahwa peningkatan kemampuan untuk memadamkan api dan tim pemadam kebakaran pemerintah yang terbatas saja tidak cukup untuk mengatasi kebakaran, terutama selama musim kering yang berkepanjangan, dan harus didukung oleh manajemen penggunaan lahan yang komprehensif, rehabilitasi dan rencana pembangunan yang berkepanjangan untuk lahan-lahan gambut yang rusak di kabupaten. Perlu dicatat bahwa potensi teknis maksimum untuk penurunan CO₂e melalui pencegahan pembakaran dapat mencapai 26 MtCO₂e apabila semua kebakaran antropogenik di Jambi dapat ditekan.

2. Mengurangi Deforestasi Hutan Dengan Kebijakan alokasi dan Penggunaan Lahan yang lebih efektif dan meningkatkan produktivitas pertanian

Penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi hutan dapat dicapai melalui dua pendekatan REDD. Pendekatan ini menargetkan para pemilik lahan dan membayar mereka untuk tidak memulai kegiatan ekonomi, seperti mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tanaman pertanian lainnya. Pendekatan ini memerlukan biaya yang relatif tinggi, misalnya : sekitar USD 30 per tCO₂e. Sebuah pendekatan alternatif adalah dengan mengurangi emisi dari deforestation hutan melalui alokasi lahan yang lebih efisien dan lestari sebagai contoh dengan menggunakan lahan yang telah rusak dan bukan lahan hutan. Untuk lahan pertanian yang baru dengan membatasi atau menghentikan ekspansi pertanian ke lahan gambut dalam. Pendekatan ini juga akan menekankan peningkatan produktivitas pertanian pada lahan-lahan yang ada melalui pelatihan para petani dengan teknik intensifikasi pertanian dan melakukan diversifikasi terhadap pilihan tanaman. Sementara kegiatan-kegiatan ini juga membutuhkan biaya, tetapi diasumsikan jauh lebih rendah dari pada membayar pemilik

lahan atas penghasilan mereka yang tidak mereka terima. Keuntungan lainnya adalah bahwa kegiatan ini akan membantu mempertahankan atau meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi.

Memastikan alokasi lahan yang efektif merupakan tantangan tersendiri, karena adanya isu-isu lintas yuridiksi kepemilikan lahan dan perencanaan tata ruang. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menjadi penting untuk memperbaiki perencanaan tata ruang dan harus didukung oleh analisis teknis mendetail, yang memberikan penilaian akurat tentang alokasi lahan saat ini dan menilai potensi manfaat ekonomi penggunaan jenis lahan berbeda untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda. Informasi ini kemudian perlu dikonsolidasi menjadi satu sistem penetapan kepemilikan lahan untuk mendaftar akta-akta dan wilayah-wilayah peta, dengan dukungan pelibatan masyarakat yang kuat.

Pada kasus pencegahan pembakaran, potensi pengurangan teknis maksimum untuk menurunkan emisi yang disebabkan oleh deforestasi hutan melalui penggunaan lahan yang lebih efektif dan alokasi lahan lebih tinggi dari pada estimasi potensi yang digunakan dalam laporan ini, dan dapat mencapai 18 MtCO₂e pada tahun 2030. Namun demikian, karena sebagian besar peluang pengurangan ini berkaitan dengan kegiatan petani rakyat, maka ada tantangan besar yang harus diatasi untuk mencapai potensi teknis penuh. Melihat jumlah, penyebaran dan tingkat keterpencilan petani di Jambi, maka potensi teknis penuh nampaknya tidak dapat dicapai pada tahun 2030.

3. Merehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau rusak (10 MtCO₂) Mengurangi emisi lahan gambut melalui reboisasi dan rehabilitasi fungsi hidrologi lahan gambut yang rusak yang tidak memiliki nilai produksi makanan dan untuk lahan-lahan yang dilindungi oleh hukum. Di sini, para pendukung kunci akan menetapkan pedoman untuk proses-proses pembahasan.

V. STRATEGY IMPLEMENTASI RAD-GRK PROVINSI JAMBI

5.1. Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran

Dalam mengimplementasikan RAD-GRK maka perlu sinkronisasi kelembagaan pelaksanaan RAD-GRK. Untuk mencapai keberhasilan pertumbuhan ekonomi rendah karbon akan memerlukan transformasi yang besar, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat luas Jambi. Dari sudut pandang kelembagaan, dukungan terhadap pertumbuhan rendah karbon memerlukan pendekatan lintas sektor yang mengkoordinir berbagai kementerian pemerintah yang penting untuk keberhasilan.

Lembaga ini perlu menjalankan enam fungsi luas untuk mendukung pertumbuhan rendah karbon. :

1. Pengumpulan dan distribusi finansial : menarik pembiayaan internasional untuk perjanjian REDD, dan CDM dan mengelola dan mendistribusikan finansial secara transparan, adil, dan efisien
2. Pemantauan dan evaluasi : menetapkan garis dasar tingkat provinsi dan standar yang tepat untuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi.
3. Kebijakan dan perencanaan tata ruang : Mengembangkan tanggapan pengaturan untuk mendukung pengurangan karbon dan menciptakan peluang akan sumber penghidupan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup optimalisasi alokasi lahan melalui perencanaan ruang dan penyelesaian perselisihan kepemilikan tanah.
4. Pelibatan Masyarakat : mengembangkan proses-proses untuk melibatkan masyarakat lokal, termasuk pembentukan dewan masyarakat lokal untuk memberikan masukan strategi dan memastikan ijin yang bebas biaya dan diinformasikan, mendorong perubahan perilaku menuju praktik-praktik yang berkelanjutan dan membangun penyelenggaraan masyarakat lokal
5. Prasarana : Mengembangkan prasarana teknologi dan sistem (misalnya: informasi pasar, suplai pemadam kebakaran, pendidikan, kesehatan) dan prasarana fisik (misalnya;

listrik,jalan) untuk mendukung penurunan emisi dan sumber penghidupan yang berkelanjutan

6. Mendukung sumber penghidupan yang berkelanjutan : mengembangkan strategi-strategi untuk mendukung pertumbuhan dan menarik investasi untuk prioritas-prioritas pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Pada tingkat Provinsi Jambi Peran Kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pendataan dan Kegiatan Masyarakat Pelaku Usaha, serta Tabel.5.2. Pemetaan Peran Kelembagaan Daerah sebagai berikut.

5.2. Identifikasi Sumber Pendanaan

Provinsi Jambi akan memerlukan bantuan internasional yang signifikan dalam waktu dekat agar sukses dalam rencana-rencananya untuk menciptakan kesejahteraan rendah karbon.

Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan membutuhkan dukungan internasional yang signifikan agar sukses dalam rencana untuk menciptakan kesejahteraan rendah karbon. Pada tahun pertama, antara USD 19 juta sampai dengan USD 39 juta diperlukan untuk menetapkan fungsi-fungsi kesiapan dasar untuk mendukung pertumbuhan rendah karbon. Selama periode 2011-2030, biaya operasional akan terus meningkat dan mencapai antara USD 373 sampai dengan USD 676 di tahun 2030 untuk mendukung implementasi pengurangan karbon dan peluang-peluang sumber penghidupan yang berkelanjutan. Walaupun keseluruhan pendanaan merupakan hal yang substansial, biaya per tCO₂e berkurang relative rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2030, total biaya pengurangan penuh per tCO₂e yang berkurang (termasuk biaya pelaksanaan) berkisar antara USD 6,8 sampai dengan USD 12,3. Sebaliknya Kurva Biaya Global *McKinsey*² mengestimasi biaya teknis³ rata-rata globalnya saja (misalnya: terlepas dari biaya pelaksanaan) berkisar antara USD 3,75 per tCO₂e berkurang.

Estimasi awal menunjukkan bahwa tanpa dukungan finansial atau sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan usaha pengurangan karbon dapat menurunkan pendapatan riil per kapita di Jambi hingga sekitar 3 persen di Jambi pada tahun 2030 oleh karena kemunduran sektor-sektor yang menghasilkan karbon dan biaya pelaksanaan. Namun demikian, dengan kebijakan yang tepat, bantuan finansial yang diperlukan dan dengan mengasumsikan tercapainya peluang-peluang pertumbuhan sektor baru, maka pendapatan rata-rata (riil per kapita) pada tahun 2030 di Jambi secara aktual dapat meningkatkan sekitar 5 sampai 13 persen diatas kasus dasar.

Adapun sumber-sumber pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RAD GRK di Provinsi Jambi sebagaimana Tabel 5.3. Sumber Pendanaan Mitigasi GRK di Provinsi Jambi, sebagaimana berikut :

Tabel 5.3. Sumber Pendanaan Mitigasi GRK di Provinsi Jambi

No	Sektor	Kebutuhan Dana	Sumber Pendanaan	Bentuk Pendanaan
1.	Kehutanan dan Gambut	Relatif sangat Besar	Internasional dan pusat	Hibah, sharing dana
2.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan	Sedang	Pusat dan daerah	APBD, APBN
3.	Energi dan Transportasi	Besar	Pusat dan daerah	APBD, APBN
4.	Industri dan Limbah	Besar	Pusat dan daerah	APBD, APBN

5.3. Penyusunan Jadwal Implementasi

Pelaksanaan RAD-GRK dituangkan di dalam jadwal implementasi dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Didalam jadwal implementasi target emisi yang akan diturunkan dihitung secara global, dan penurunan pertahun emisi dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan dan teknis kegiatan. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 5.5. Jadwal Implementasi RAD-GRK Provinsi Jambi.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat capaian target emisi secara bertahap sepanjang tahun perencanaan RAD-GRK. Analisa ini juga digunakan untuk perbaikan pelaksanaan implementasi dari sisi pembiayaan dan teknis kegiatan. Adapun fungsi dari monitoring dan evaluasi dapat diterangkan untuk perhitungan biaya tahap berikutnya, terutama untuk sektor prioritas mitigasi emisi yakni sektor kehutanan dan lahan, sebagaimana berikut :

1. Kesiapan kelembagaan dasar : biaya tambahan terkait pembentukan struktur kelembagaan dasar yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan rendah karbon. Termasuk didalamnya biaya pembentukan dan perekrutan unit pelaksana yang baru, demikian pula pelatihan bagi para pejabat pemerintah.
2. Menarik, mengelola dan mendistribusikan finansial : biaya tambahan terkait upaya menarik minat pembiayaan internasional untuk REDD, dan CDM dan mengelola serta mendistribusikan finansial secara transparan, adil, dan efisien.
3. Monitoring dan Evaluasi : Biaya terkait dengan pembentukan garis dasar tingkat provinsi dan standar implementasi untuk pengawasan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) berhubungan dengan pendekatan tier sebagaimana disarankan oleh IPCC. Perkiraan biaya didasari oleh asumsi bahwa Provinsi Jambi harus dapat memenuhi 3 tingkatan standar : Estimasi biaya low-end (tingkat rendah) dengan asumsi bahwa Jambi mampu membangun prasarana inventarisasi nasional, sedangkan perkiraan biaya high-end (tingkat tinggi) didasari oleh asumsi bahwa system MRV lengkap harus mulai dibentuk dari awal. Sasaran skema pelaporan tingkatan 3 akan memungkinkan Jambi terlibat dalam perdagangan karbon. Jambi juga merupakan sasaran pendekatan partisipasi dalam beberapa tugas inventarisasi (contoh : pengambilan sampel di lapangan) yang akan diambil alih oleh masyarakat yang tinggal di dekat wilayah hutan. Pendekatan partisipasi ini memiliki kelebihan yaitu 1) masyarakat dapat terlibat langsung dalam keseluruhan proses MRV; 2) bagian pendanaan akan mengalir ke masyarakat dan 3) lapangan pekerjaan akan tersedia di wilayah terpencil, meski akan mengakibatkan sedikit peningkatan biaya. Sebagaimana Jambi tengah menangani

sebagian lahan gambut yang rusak, penggunaan data dari teknologi penginderaan jauh dari optikal LiDAR (Light detection and ranging) dianggap bermanfaat sebagaimana LiDAR dapat menyediakan informasi terperinci tentang emisi akibat pembakaran dan bahkan dekomposisi gambut. Penggunaan LiDAR merupakan biaya MRV terbesar (45% dari total biaya).

4. Kebijakan dan perencanaan tata ruang: Biaya tambahan terkait pembentukan tanggapan pengaturan untuk mendukung pengurangan karbon dan membuka peluang sumber penghidupan berkelanjutan. Termasuk didalamnya biaya pengembangan tata ruang dan sertifikasi lahan. Perkiraan biaya tata ruang berdasarkan informasi dari Rencana Umum Rehabilitasi dan Revitalisasi Wilayah Proyek Eks-Mega Rice, dan ekstraplorasi total wilayah Jambi sementara perkiraan biaya untuk sertifikasi lahan rata-rata mencapai USD 80 per hektar yang tercakup (termasuk biaya prasarana) dan dalam hal Jambi diasumsikan bahwa 80 persen dari provinsi belum memiliki sertifikasi yang jelas.
5. Pelibatan masyarakat : biaya tambahan terkait dengan pengembangan dan proses pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat, termasuk pembentukan badan masyarakat setempat guna member masukan terhadap strategi-strategi serta menjamin persetujuan terbuka, mendukung perubahan perilaku menuju praktek berkelanjutan serta meningkatkan penegakan oleh masyarakat local.
6. Prasarana : Biaya tambahan untuk pengembangan teknologi dan prasarana system atau prasarana ringan (misalnya: informasi pasar, regu pemadam kebakaran, pendidikan, kesehatan) dan infrastruktur berat (misalnya : listrik, jalan raya) untuk mendukung pengurangan emisi dan sumber penghidupan berkelanjutan.
7. Pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan : Biaya tambahan yang berhubungan dengan pengembangan strategi sektor yang merupakan sumber penghidupan berkelanjutan dan menarik minat investasi bagi prioritas pertumbuhan yang teridentifikasi. Biaya-biaya ini termasuk program untuk perpanjangan layanan pertanian, pembentukan koperasi dan usaha kecil serta meningkatkan pemrosesan barang-barang lokal. Biaya tambahan untuk memperkuat Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPM) melalui penambahan

personil dan anggaran untuk mendukung peranannya dalam menarik minat investasi baru terhadap Provinsi ini.

Namun secara umum sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dilakukan oleh SKPD sektoral terkait di wilayah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Pelaksanaan dilakukan terkoordinir dengan SKPD di Kabupaten/kota implementasi RAD-GRK ini dimonitor oleh Bappeda Provinsi Jambi setiap tahun anggaran kegiatan, hasil monitoring tersebut di evaluasi progres capaian pertahun. Progres capaian di bandingkan dengan target tahunan serta target kumulatif tahun terakhir dari target global yang ditentukan. Hasil evaluasi akan dikirimkan kepada Kementerian/Lembaga pemerintah yang selanjutnya akan di evaluasi akhir oleh Bappenas.

Tabel 6.1. Sistem Monitoring dan Evaluasi RAD-GRK Provinsi Jambi

No	Pelaksana RAD GRK	Monitoring	Evaluasi	Kementerian /Lembaga	Evaluasi Akhir
1.	Dinas Pertanian Provinsi berkordinasi dengan kabupaten	Bappeda Provinsi	Bappeda Provinsi	Kementerian Pertanian	Bappenas
2.	Dinas Kehutanan Provinsi berkordinasi dengan kabupaten	Bappeda Provinsi	Bappeda Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappenas
3.	Dinas ESDM Provinsi berkordinasi dengan kabupaten	Bappeda Provinsi	Bappeda Provinsi	Kementerian ESDM	Bappenas
4.	Dinas Perhubungan Provinsi berkordinasi dengan kabupaten	Bappeda Provinsi	Bappeda Provinsi	Kementerian Perhubungan	Bappenas
5.	Dinas Perindustrian Provinsi berkordinasi dengan kabupaten	Bappeda Provinsi	Bappeda Provinsi	Kementerian Perindustrian	Bappenas
6.	BLHD Provinsi berkordinasi dengan kabupaten	Bappeda Provinsi	Bappeda Provinsi	Kementerian LH	Bappenas

VII. PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang telah disusun ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011. RAD-GRK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Pelaku ekonomi dan masyarakat dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana yang telah disepakati dalam Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke 13 United nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) dan hasil COP-15 di Cancun serta pertemuan G-20 di Pittsburg oleh Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan pihak luar.

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 36 Tahun 2012
 TANGGAL : Agustus 2012

**KEGIATAN INTI
 RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA**

BIDANG PERTANIAN	
Target Penurunan Emisi (26%)	:
Target Penurunan Emisi (41%)	:
Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi pertanian dengan emisi GRK yang rendah 2. Peningkatan fungsi dan pemeliharaan sistem irigasi 	
Strategi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sumber daya lahan dan air 2. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorpsi CO2 secara Optimal 3. Menstabilkan elevasi muka air dan memperlancar sirkulasi air pada jaringan irigasi 	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan dan kelengkapan saluran tersier, kuarter, dan sub kuarter	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim	0.16	Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembangunan saluran sudetan (drainase)	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim		Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembangunan tanggul keliling dan pintu-pintu air	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim		Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembangunan bangunan bagi, pintu air, gorong-gorong dan siphon	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim		Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya bantuan benih dan saprodi	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim		Dinas Pertanian Prov, Kabupaten
2	Peningkatan Penerapan teknologi pertanian	Pengembangan Tata air mikro dilahan pasang surut	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat dan Tanjabtim	0.002	Dinas Pertanian Prov, Kabupaten
		Pembukaan lahan tanpa bakar PLTB)	2010-2020	Kabupaten Tanjabbarat, Tanjabtim, Tebo, Bungo, dan Ma Jambi	5.34	Dinas Pertanian Kabupaten Tanjabbarat, Tanjabtim, Tebo, Bungo, dan Ma Jambi serta Provinsi

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO ₂ e)	PENANGGUNG JAWAB
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	Terlaksananya pembuatan bangunan embung untuk penampungan air limpasan (run off)	2010-2020	Seluruh kab/kota kecuali kota Jambi	0.16	Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
		Terlaksananya pembuatan dam parit yang berfungsi sebagai bangunan konservasi air	2010-2020	Seluruh kab/kota kecuali kota Jambi		Dinas Pertanian dan Dinas PU Prov, Kabupaten
4	Pemamfaatan Pupuk Organik dan Bio Pestisida dalam budidaya tanaman untuk mencegah laju peningkatan emisi Gas Rumah Kaca melalui Penggunaan UPPO	Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	2010-2020	Seluruh kab/kota kecuali kota Jambi	9.77	Dinas Pertanian Prov, Kabupaten/kota kecuali kota Jambi

BIDANG KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT

Target Penurunan Emisi (26%) :

Target Penurunan Emisi (41%) :

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK :

1. Penurunan emisi GRK sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja , dan menambah pendapatan masyarakat serta daerah
2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa
3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada)
4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal

Strategi

1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK
2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK
3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan sustainable Forest Management
4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta menstabilkan elevasi muka air jaringan tata air rawa
5. Mengoptimalkan sumberdaya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi
6. Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terbentuknya KPH (KPHL dan KPHP Model) sebanyak	2010-2014	KPHL Model Sungai Bram Hitam di Kab. Tanjabbar, KPHP Model di Kab. Sarolangun dan KPHP Model di Kab. Merangin	0.79	Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten
2	Perencanaan pemamfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan	Restrukturisasi Industri Kehutanan sebanyak 104 Izin Usaha pemamfaatan hasil Hutan Kayu	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi	1.91	Dinas Kehutanan , Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten
		Tercapainya peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi	0.04	Dinas Kehutanan, Perindustrian dan perdagangan pariwisata, BKSDA Jambi dan BP-DAS Batang Hari
3	Pengembangan pemamfaatan Jasa Lingkungan	Terlaksananya demonstration activity Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) di kawasan konservasi (hutan gambut) sebanyak 2 kegiatan	2010-2014	Provinsi Jambi	1.84	Dinas Kehutanan provinsi/Kabupaten, Perguruan Tinggi dan LSM

4	Pengukuhan Kawasan hutan	Terlaksananya penataan batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi kawasan hutan) sepanjang 2.048 km	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi	10.11	Dinas Kehutan Provinsi dan BPKH Wilayah XIII Bangka Belitung
5	Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, serta reklamasi hutan di DAS prioritas	Terlaksananya rehabilitasi hutan pada DAS Batanghari seluas 26.747 ha	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi	0.98	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota, BP-DAS Batanghari, LSM dan Perguruan Tinggi
		Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 82.095 ha	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jambi	3.01	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota, BP-DAS Batanghari, LSM dan Perguruan Tinggi
		Pembuatan hutan kota seluas 200 ha	2010-2014	Seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jambi	0.01	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten/Kota, BP-DAS Batanghari
		Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 722 ha	2010-2014	Kab. Tanjabbar, Tanjabtim, Muaro Jambi dan Batang Hari	0.03	Dinas Kehutanan, BLHD Provinsi/Kabupaten, Balitbangda Provinsi BP-DAS Batanghari
6	Pengembangan perhutanan sosial	Terfasilitasinya penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) seluas 110.000 ha	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	4.07	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BP-DAS Batanghari, BP2HP Jambi

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
7	Pengendalian kebakaran hutan	Tercapainya penurunan jumlah Hot spot di Provinsi Jambi sebesar 20% dari rerata tahunan periode 92005-2009) dengan tingkat keberhasilan sebesar 67,20%. Target rata-rata tahunan 59,2 hotspot	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	1.99	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BKSDA Jambi dan seluruh UPT Kementerian serta Balai Taman Nasional
8	Penyidikan dan pengamanan hutan	Terselesainya penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (Illegal logging, penambangan illegal dan kebakaran) minimal 75%	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	0.23	Dinas Kehutanan provinsi /kabupaten/kota BKSDA Jambi, kepolisian daerah dan kejaksaan
9	Pengembangan kawasan konservasi,	Meningkatnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan sebesar 10%	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi	2.44	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BKSDA Jambi dan Balai Taman Nasional
		Terlaksananya penanganan perambahan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Provinsi Jambi	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi kecuali kota Jambi	4.15	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BKSDA Jambi, kepolisian daerah dan kejaksaan
10	Peningkatan usaha hutan tanaman	Terlaksananya pencadangan areal hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat (HTI/HTR) seluas 229.000 ha	2010-2014	Seluruh ibukota kabupaten/kota se Provinsi Jambi kecuali kota Jambi	8.4	Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, BP-DAS Batanghari, BP2HP Jambi

BIDANG ENERGI DAN TRANSPORTASI

Target Penurunan Emisi (26%) :

Target Penurunan Emisi (41%) :

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK :

1. Peningkatan penghematan energi
2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching)
3. Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT)
4. Pemamfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik, dan sarana transportasi
5. Pengembangan transportasi massal daerah yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

Strategi :

1. Menghemat penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih dan efisien maupun pengurangan konsumsi energi tak terbarukan (fosil)
2. Mendorong pemamfaatan energi baru terbarukan skala kecil dan menengah

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Reklamasi lahan pasca tambang	Reklamasi Tambang Batu bara	2010-2020	Kabupaten Ma. Jambi, Bungo,	1.18	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
2	Pemamfaatan biogas	Biogas	2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
3	Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Pembangunan PLTMH	2010-2020	Kabupaten Merangin, Bungo, dan Sarolangun	2.7	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
		PLTS Komunal	2010-2020	Kab Tanjabbar dan Tanjabtim	0.016	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
		PLT Panas Bumi	2010-2020	Kabupaten Kerinci	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab Kerinci
		PLTA Kerinci	2010-2020	Kabupaten Kerinci	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab Kerinci
		PLTU Samaran	2010-2020	Kabupaten Sarolangun	0.11	Dinas ESDM Prov dan Kab Sarolangun
		Desa Mandiri Energi (Biofuel)	2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.12	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
4	Pembangunan kilang mini plant Liquid Petroleum Gas (LPG)	Mini LPG Plant	2010-2020	Dinas ESDM Prov	0.03	Dinas ESDM Prov
5	Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa	City gas	2010-2020	Kota Jambi (Provinsi Jambi)	0.006	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
6	Pemamfaatan gas Flare untuk pembangkit		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.03	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
7	Gasifikasi Batubara		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.03	Dinas ESDM Prov dan Kab/Kota
8	Pembangunan ITS (<i>Intelligent Transport System</i>)		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.27	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
9	Penerapan pengendalian Dampak Lalu lintas (<i>Traffic Impact Control/ITC</i>)		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.24	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
10	Reformasi Sistem transit-Bus Rapid Transit (BRT)/Semi BRT		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.69	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
11	Pelatihan sosialisasi Smart I Driving (<i>eco-driving</i>)		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.002	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Penerapan smart Card di terminal Type A		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.002	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
13	Penerapan standar emisi kendaraan bermotor		2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.3	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota
14	Peremajaan armada angkutan umum	Sosialisasi Peremajaan armada angkutan umum	2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.36	Dishub Provinsi, Kabupaten/Kota

BIDANG INDUSTRI

Target Penurunan Emisi (26%)

Target Penurunan Emisi (41%)

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK :

1. Peningkatan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi

Strategi :

1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang padat energi

2. Memberikan insentif pada program efisiensi energi

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1.	Konservasi dan audit energi	Terbentuknya sistem manajemen energi	2010-2020	Seluruh Kab/Kota	0.38	Dinas ESDM dan BLHD Prov/kab/kota

BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH

Target Penurunan Emisi (26%)

Target Penurunan Emisi (41%)

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAD-GRK :

1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah domestik

Strategi

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda)

2. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle).

3. Perbaikan proses pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

4. Peningkatan/pembangunan/rehabilitasi TPA

5. Pemamfaatan limbah/ sampah menjadi energi yang ramah lingkungan

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	INDIKASI PENURUNAN EMISI GRK (Juta Ton CO2e)	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengelolaan sampah terpadu Reduce, Reuse, Recycle (3R)	Meningkatnya pengelolaan TPA	2010-2020	Seluruh Kab/kota di Provinsi Jambi	0.21	Dinas PU dan BLHD kab/kota dan Provinsi

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI Nomor : 343/Kep.Gub/Bappeda-2/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POKJA RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI JAMBI TAHUN 2014

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa perubahan iklim global yang terjadi pada akhir-akhir ini merupakan efek yang terjadi dari meningkatnya Gas Rumah Kaca (GRK) yang terakumulasi dari kegiatan aktivitas manusia di muka bumi;
- b. bahwa untuk mengendalikan emisi GRK maka Provinsi Jambi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca, dan meluncurkan Buku Pedoman Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebagai acuan pelaksanaan RAD-GRK di Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Pokja Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jambi Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 38/M.PPN/HK/03/2012 tentang Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentuk Tim Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pokja dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada peraturan perundangan yang sudah ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.
- KETIGA : Tim Pokja dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengolahan data, analisis data, dan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan sektor atau bidang tugas pada Tim Pokja;
 - b. menyiapkan jadwal dan rencana kerja kegiatan pokja sesuai dengan sektor atau bidang tugas pada Tim Pokja;
 - c. menyerahkan hasil pengolahan data, analisis data, dan informasi sebagaimana pada huruf a, kepada Ketua Tim Pokja dengan melalui Sekretaris Tim Pokja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal: 23 Mei 2014

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jambi
2. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Jambi (Biro Hukum 2 ekspl)
4. Anggota Tim Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang diputuskan
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 343/Kep.Gub/Bappeda-2/2014
TANGGAL : 23 Mei 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM POKJA RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI
GAS RUMAH KACA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2014**

I. Tim Koordinasi

Penanggung Jawab : 1. GUBERNUR JAMBI
2. WAKIL GUBERNUR JAMBI

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Jambi

Anggota : 1. Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi
2. Kadis Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kadis Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
4. Kadis Peternakan dan Keswan Provinsi Jambi
5. Kadis Perkebunan Provinsi Jambi
6. Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
7. Kadis Perhubungan Provinsi Jambi
8. Kadis ESDM Provinsi Jambi
9. Kepala BLHD Provinsi Jambi
10. Kadis Perindag Provinsi Jambi

II. Kelompok Kerja (Pokja)

Kelompok Kerja (Pokja) I : Sektor Berbasis Lahan

Ketua : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Anggota : 1. Bidang Penataan Kawasan Hutan (Dishut)
2. Bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Perkebunan (BLHD)
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
4. Bidang Sarana, Prasarana, dan Kerjasama Pembangunan, Subbidang Sarana, Prasarana, dan Tata Ruang Wilayah (Bappeda)
5. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
6. Badan Pertanahan Nasional Jambi (BPN)
7. Bidang Perizinan (BPMD dan PPT)
8. Bidang Sumber Daya Air (PU)
9. Bidang Pertambangan Umum (ESDM)
10. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DKP)

Kelompok Kerja (Pokja) II : Sektor Energi dan Transportasi

Ketua : Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jambi

Anggota : 1. Bidang Perhubungan Darat (Dishub)
2. Bidang Sarana, Prasarana, dan Kerjasama

Pembangunan, Subbidang Pengembangan
Kerjasama Pembangunan (Bappeda)

3. Bidang Bina Marga (PU)
4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan
Penyebrangan (Perhubungan)
5. Bidang Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi
(ESDM)
6. PLN Cabang Jambi

- Kelompok Kerja (Pokja) III : Sektor Pengelolaan Limbah dan Industri
Ketua : Sekretaris BLHD Provinsi Jambi
Anggota : 1. Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan
(BLHD)
2. Bidang Pengendalian Kerusakan dan
Pencemaran Lingkungan (BLHD)
3. Bidang Industri Menengah dan Besar
(Disperindag)
4. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan
(Disperindag)
5. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
(Disbun)
6. Bidang Budidaya Ternak (Peternakan)
7. Bidang Cipta Karya (PU)
8. Bidang Perikanan dan Budidaya (DKP)
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG Jambi)

III. Sekretariat RAD-GRK

- Ketua : Kepala Bidang Ekonomi, SDA, dan LH Bappeda
Provinsi Jambi
Sekretaris : Kasubbid Pertanian SDA dan LH
Anggota : 1. Lindawati, S.Pt, M.Si (BLHD)
2. Yuhelemni, SP, M.Si
3. Ratna SE, M.A.B
4. Ir. Ainul Irfan, MTP (Biro Administrasi
Perekonomian dan SDA)
5. Hendra Admaja, SE
6. Winarsih, ST (BLHD)
7. Christ Andy Vic Sinuhaji, ST
8. Hasanuddin, ST

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS